



RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2024





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 20);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB V. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;

- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang akan dicapai. Program kegiatan pada Renja 2024 mengacu pada Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang dijabarkan kedalam Renstra tahun 2024-2025.

Penyusunan Dokumen Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) terkhusus kepada Pemerintah Daerah yang kepala daerahnya telah habis masa jabatan pada tahun 2023 agar membuat Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 yang kemudin disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026, kemudian memerintahkan kepala Perangkat Daerah agar Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026 dan kemudian di jabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Dokumen Rencana Kerja terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan untuk periode satu tahun untuk menjamin adanya konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja merupakan perencanaan yang menjadi dasar kinerja Setda Prov. Kaltim yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Disamping itu pula untuk *review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan capaian tahun berjalan. Dokumen Rencana Kerja akan menjadi pedoman umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH

Dra. Sri Wahyuni, M.PP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641028 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABLE..... iii

BAB I4

 1.1 Latar Belakang4

 1.2 Landasan Hukum.....7

 1.3 Maksud dan Tujuan.....10

 1.4 Sistematika Penulisan.....11

BAB II.....15

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
 CapaianRenstra Sekretariat Daerah.....15

 2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 64

 2.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
 Timur110

 2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 Perangkat Daerah.....144

 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD153

 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....191

BAB III194

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....194

 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
 Kalimantan Timur198

 3.3 Program dan Kegiatan201

BAB IV218

BAB V.....321

 5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan321

 5.2 Rencana Tindak Lanjut.....322

DAFTAR TABLE

Tabel 2. 1..... 16

Tabel 2. 2..... 66

Tabel 2. 3..... 144

Tabel 2. 4..... 146

Tabel 2. 5..... 154

Tabel 2. 6..... 191

Tabel 3. 1..... 200

Tabel 3. 2..... 201

Table 4. 1..... 219

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tak lepas dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan landasan hukum di bidang perencanaan dan pembangunan yang mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis tiga tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat tersebut, dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur tahun 2024, Rencana Kerja memuat program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pencapaian sasaran-sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Lebih luas lagi diharapkan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai gambaran bagaimana mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, penetapan lokasi (penlok) penegasan batasan wilayah dan pertanahan, pada Biro POD, pemilihan pengadaan barang dan jasa, pembinaan pelaku barang dan jasa, LPSE pada Biro PBJ, fungsi pengelolaan pemberian dana hibah terkait sarana prasarana keagamaan, dan hibah pendidikan khusus berbasis keagamaan Biro Kesejahteraan Rakyat.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kalimantan Timur Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Sekretariat Daerah, hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, juga akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan di lingkungan Biro-Biro untuk tahun 2024 sesuai prioritas Pembangunan Kalimantan Timur, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan memperhatikan kebijakan dan program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Tahapan ini dilakukan dengan:
 - a. membentuk Tim Penyusun Renja Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah;
 - b. Melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah;
 - c. menyusun tata cara sebagai panduan kerja; dan
 - d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
 Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dan mengevaluasi capaian Renja Sekretariat Daerah tahun yang lalu.
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
 Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Sekretariat Daerah setelah dikeluarkannya Surat Edaran Wakil Gubernur Kalimantan Timur tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, yang mengacu pada rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
 Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu

indikatif. Rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:

- I. Pendahuluan
 - II. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
 - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - IV. Rencana Kerja dan Pendanaan
 - V. Penutup
6. Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan berpedoman pada tahapan dimaksud, maka diharapkan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi komitmen bersama guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah, serta menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah:

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;(Pergub SOTK yang baru masih dalam proses)
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang
27. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
28. Surat Edaran Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor :050/0378/B.PPEPD-Bapp/2023 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

29. Surat Edaran Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.4/6353/Bapp—II tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Menjadi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu disusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud:

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman dalam menentukan arah dan penetapan program dan kegiatan tahun 2024;
2. Pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan Program 2022 dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi kebutuhan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator, dan pagu anggaran.

1.3.2 Tujuan:

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, untuk penambahan kegiatan/sub kegiatan, penghapusan kegiatan/sub kegiatan, perubahan indikator kinerja, perubahan target, dan perubahan pagu anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
3. Sebagai alat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan

kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan tersusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja

1.4Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja Sekretariat Daerah, proses penyusunan Renja Sekretariat dan keterkaitan antara Renja Sekretariat Daerah dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Sekretariat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah .

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Sekretariat Daerah serta susunan garis besar dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2022 dan capaian Renstra Sekretariat Daerah

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melakukan *review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun yang lalu, dan/atau realisasi APBD, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan minimal (SPM), maupun terhadap IKK.

2.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Menjelaskan uraian Tugas, Fungsi dan diagram struktur Sekretariat Daerah

2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Menjelaskan permasalahan yang ada pada Sekretariat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi pelayanan Sekretariat Daerah.

2.5 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, meliputi

tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi misi, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah.

2.6 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Menguraikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antar rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024

Berisi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta kaitannya dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2024.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah

Berisi rencana kerja dan pendanaan biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2024.

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan, catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan dan program yang telah disusun, dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan evaluasi yang dijabarkan dalam Bab Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dimaksudkan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja tahun lalu.

Evaluasi yang dimaksud untuk mengetahui:

1. Target kinerja yang tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Agar lebih memudahkan dalam memahaminya evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, dituangkan ke dalam Tabel 2.1.1 berisi evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan pencapaian kinerja berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai tahun 2022, dapat dilihat dalam table 2.1 di bawah ini:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					BIRO PEMERINTAHAN DAN OTAONOMI DAERAH									
	1				Urusan									
	1	01			Bidang Urusan									
				1	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100						
				2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan		100						
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD yang tersusun		2						
				4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan		100						

				5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis		12								
				6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pelaksanaan Pengelola Keuangan		12								
				7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah		100								
				8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis		2								
				9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah		100								
				10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai		30								
				11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12								
				12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100								

				13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat		12							
				14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik		100							
				15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja		40							
				16	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Terlaksananya Koordinasi dalam Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah		65							
				17											
				18											
				19	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Presentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota Yang di Sepakati		85							
				20	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Laporan Koordinasi penyelenggaraan UrusanPemerintahan		3							
				21	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah penegasan Batas Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota Se Kalimantan timur secara jelas danpasti		4							
				22	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi,fasilitasi dan konsultasi di bidang penyelenggaraan		85							

[illegible]

					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan			100 %	100 %	100			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran			2 Dokumen	2 Dokumen	100			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan			98 %	98 %	100			
					Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelola Keuangan			12 Laporan	12 Laporan	100			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah			100 %	100 %	100			
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Bimbingan Teknis			6 Orang	6 Orang	100			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah			100 %	100 %	100			
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan Alat tulis kantor			12 Laporan	12 Laporan	100			
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan barang cetakan dan penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	100			

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90 OT	90 OT	100			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi		100 %	100 %	100			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 Unit	12 Unit	100			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	100			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan		350 Lembar	350 Lembar	100			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis		12 Dokumen	12 Dokumen	100			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik		100 %	100 %	100			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional		9 Unit	9 Unit	100			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara		12 Laporan	12 Laporan	100			

					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah			87 %	87 %	100			
						Persentase pengendalian penerapan SPM			100 %	100 %	100			
						Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah			87 %	87 %	100			
					Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota yang disepakati			100 %	100 %	100			
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Koodinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			3 Laporan	3 Laporan	100			
					Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Laporan Fasilitasi Penataan Wilayah			4 Laporan	4 Laporan	100			
					Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentasen Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah			100 %	100 %	100			
					Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Pejabat Negara			3 Laporan	3 Laporan	100			
					Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Laporan Korrdinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan			4 Laporan	4 Laporan	100			

					Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			3 Laporan	3 Laporan	100			
					Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Usulan Kerja Sama yang ditindaklanjuti			95 %	95 %	100			
					Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama antar pemerintah			4 laporan	4 laporan	100			
					Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama badan usaha/swasta			4 laporan	4 laporan	100			
					Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan kegiatan evaluasi pelaksanaan kerjasama			1 laporan	1 laporan	100			
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan						100		
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan						100		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan						2		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan						98		

					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan pengelola keuangan						12		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah						100		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang telah mengikuti bimtek						6		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah						100		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						12		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan						12		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi SKPD						90		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah						100		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia						350		

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya						12		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional						9		
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat EKPPD "tinggi"						80		
					Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Presentase tapal batas wilayah Kab/Kota yang disepakati						100		
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum						3		
					Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah laporan fasilitasi penataan wilayah						4		
					Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah						100		
					Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah laporan fasilitasi pejabat negara						3		

					Pengembangan otonomi dan penataan urusan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan						4		
					Evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah						3		
					Fasilitasi Kerjasama Daerah	Presentase kerjasama yang ditindak lanjuti						100		
					Fasilitasi kerjasama antar pemerintah	Jumlah laporan kerjasama antar pemerintah						1		
					Fasilitasi kerjasama badan usaha/swasta	Jumlah laporan kerjasama antar badan usaha/swasta						1		
					Evaluasi pelaksanaan kerjasama	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama						1		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100							
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pereangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%							
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen							
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen							
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95%							
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 laporan							
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%							

[illegible]

[illegible]

					Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen							
					Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen							
					Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama	3 Laporan							
					BIRO HUKUM									
	1				Urusan									
	1	01			Bidang Urusan									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87	0	0	0				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	0	4	2	2	100	2	2	100
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100	100	100	100	100	100	42	42
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	12	100	12	6	50
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	50	50
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12	12	12	12	100	12	6	50
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	0	0	0	0	100	0	0
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	0	3	0	0	3	0	0

					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100			
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	12	12	12	100	12	6	50
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	0	0	0	0			
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	0	12	12	12	100	12	6	50
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15	0	0	0	0			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	45	40	40	100			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	8	5	12	240			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100	12	5	42
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12	12	12	12	100	12	5	42
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	100	100	100	100		50	50
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	25	25	25	100	30	15	50
					Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non litigasi dan HAM	0	100	109	132	121,10			

[illegible]

	1				Urusan									
	1	01			Bidang Urusan									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat		75	84	83	98,81	84%	0%	0
						Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	100							
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	93	90	90,00%	90,00%	100	93,61%	50,00	53,41
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93	2	2 dokumen	2 dokumen	100	3 Dokumen	1 dokumen	33,33
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	2	2 dokumen	2 dokumen	100	1 Laporan	1 laporan	100
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	90%	90%	100	84%	50%	59,52
					Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	0	4 orang	4 orang	100	4 orang	2 orang	50
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	5 bulan	23,37
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	12 laporan				17 paket	2 paket	11,76
						Jumlah laporan pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Laporan	12 laporan	100			
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12					12 paket	3 paket	25
						Jumlah laporan barang cetakan dan penggandaan		12	12 Laporan	12 Laporan	100			

					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12	12	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	4 laporan	33,33
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	12	12	12	12	100	12 bulan	4 bulan	33,33
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	4 laporan	33,33
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	4 laporan	33,33
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	4 laporan	33,33
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	85	90%	90	100	100%	16,67	16,67
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	10	25 Unit	25 Unit	100	10 Unit	2 unit	20
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	25	11 Unit	11 Unit	100	20 Unit	3 unit	15
					PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang ditindaklanjuti	100%	85	90%	90%	100	90%		
						Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang ditindaklanjuti	100					100%		
					Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100	85	90%	90%	100%	100%	20	20,00
					Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	200					100 Unit	20 unit	20

						Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Sarana dan Prasarana Spiritual		1	10 Dokumen	10 dokumen	100			
					Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10	1				10 Lembaga	2 lembaga	20
						Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Bina Mental Spiritual			13 Dokumen	10 dokumen	100			
					Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100	85%	90%	90%	100	100%	30%	30%
					Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12	2 dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100	13 Dokumen	0	0
					Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12	1 dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100	12 Dokumen	2 dokumen	16,67
					Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12	2 dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	13 Dokumen	2 dokumen	15,38
					Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100	85%	90%	90%	100	100%	0	0
					Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12	3	11 Dokumen	11 Dokumen	100	13 Dokumen	0	0

					Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12	3	13 Dokumen	13 Dokumen	100	20 Dokumen	0	0
					Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12	3	10 Dokumen	10 Dokumen	100	12 Dokumen	0	0
					BIRO PEREKONOMIAN									
	1				Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan									
	1	01			Sekretariat Daerah									
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian	-	80	83	87	105%	84	168,05	168,05
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81	-	-	-	-	-	-	-
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	-	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3,00
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	12	12,00
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	12	12,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95%	90%	92%	92%	100%	100%	282%	296,84

					Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	12 daftar	12 laporan	12 laporan	100%	3 dokumen	27	9,00
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	-	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3,00
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan BMD	-	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3	3,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	200%	2,00
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	28 laporan	26 laporan	93%	25 dokumen	79	79,00
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat	-	-	14 orang	9 orang	64%	3 orang	12	12,00
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41 paket	-	-	-	-	-	-	-
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	90%	100%	100%	100%	99,43%	100%	300%	333,33
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	7 unit	12 laporan	12 laporan	99,84%	50 paket	69	575,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Porsi	-	600 porsi	540 porsi	90%	25 paket	565	94,17
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 Laporan	1600 lembar	12 laporan	12 laporan	97,47%	2 paket	1614	13450,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	12 Laporan	4 terbitan	12 laporan	12 laporan	100%	96 dokumen	112	933,33
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	120 Laporan	45 kali	153 OT	124 OT	99,81%	120 laporan	289	3468000,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	200%	200,00
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	-	-	-	-	-	-	-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	4 unit	5	500,00

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300,00
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos	120 lembar	200 lembar	120 lembar	114 lembar	95%	1 laporan	315	262,50
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak non teknis	12 Laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 laporan	36	43200,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3	150,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	25 unit	12 unit	12 laporan	12 laporan	100%	25 unit	49	18,99
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	81%	80%	95	96,77	102%	100%	98,57	12169,14
						Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	90%	-	-	-	-	-	-	-
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	3 dokumen	5,00	500,00
					Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Laporan	1 Laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 dokumen	5,00	250,00
					Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 dokumen	3,00	300,00
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	7 laporan	9,00	900,00
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Laporan	1 Laporan	6 laporan	6 laporan	100%	3 dokumen	5,00	83,33
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	2 Laporan	1 Laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 dokumen	5,00	250,00

						Pertambangan dan Lingkungan Hidup								
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Laporan	1 Laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 dokumen	5,00	250,00
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	3 dokumen	5,00	500,00
					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4 Laporan	1 Laporan	4 laporan	4 laporan	100%	10 dokumen	15,00	375,00
					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 dokumen	3,00	300,00
					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 dokumen	3,00	300,00
					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%							
						Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan			83%	84,03%	101,24%	84%	84,75%	100,89%
						Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	80%							
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		1 Dokumen						
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD		1 Dokumen						
01	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan daerah		1 Dokumen						

						Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (Biro Administrasi Pembangunan)			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
						Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan						1 Dokumen	0	0
						Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%							
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas	5 Laporan							
	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%				
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	0	0
	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
						Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%					100%		
	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian pegawai		33 Stel	33 Stel	100%				
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Stel					15 Paket	52 Paket	346,67%
	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan	2 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%				
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang					10 Orang	10 orang	100,00%
	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi	5 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%				
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang					10 Orang	5 Orang	50,00%
	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%		3 Dokumen		

						Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%							
	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai		54 Unit	32 Unit	32 Unit	100%			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan					12 Laporan	0	0
	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan		100 Buku	10 Buku	10 Buku	100%			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						10 Paket	5 Paket	50%
						Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan							
	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi		20 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%			
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	4 Laporan					15 Laporan	11 Laporan	73%
	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	90%					85%		
	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit					20 Unit		
						meningkatnya pelayanan kantor		85%				85%	50%	59%
	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
						Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	90%						
	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50%

	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan				12 Laporan	6 Laporan	50%
	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		25 Orang	25 Orang	25 Orang	100%		
	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan				12 Laporan	6 Laporan	50%
	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		80%					
	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara			30 Unit	30 Unit	100%		
	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85%				85%	75%	88%
	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		8 Unit	1 Unit	1 Unit	100%		
	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit				1 Unit	1 unit	100%
	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		4 Unit	3 Unit	3 Unit	100%		
	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit				3 Unit	3 unit	100%
	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharaannya Peralatan dan Kelengkapan Kerja		20 Unit	30 Unit	30 Unit	100%		

						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit						30 Unit	20 unit	67%
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Terlaksananya Koordinasi dalam Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah		100%							
					Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya Dokumen LPPD		1 Dokumen							
					Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen Evaluasi dan Penyelenggaran Pemerintah									
					PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	80%	70%							
01	8					Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan				100%	100%	100%	100%	50,00%	50,00%
						Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan			75%	85,37%	113,83%	80%	30,00%	37,50%	
					Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		3 Dokumen							
01	08	1.01				Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	0	0	
						Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80%								
						Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	80%								

						Dokumen Evaluasi dan Pelaporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		12 Laporan	12 Laporan	6	50%			
	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50%
	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%			
	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50%
	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III		36 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	3 Laporan	50%
	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I	2 Laporan							
	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II	2 Laporan							
	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III	2 Laporan							
	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		3 Dokumen						
	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	0	0
	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80%							

	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan Analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan		12 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%			
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen					1 Dokumen	0	0
	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Pelaksanaan pembangunan daerah		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50%
	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Laporan Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembanguan yang telah dilaksanakan		2 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen					1 Dokumen	0	0
					BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA									
	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa	-	82.07	83	81,36	98,02	84	-	-
						Indek Kualitas Layanan Keskretariatian Biro PBJ	71	-	-	-	-	-	-	-
	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya laporan keuangan yang akuntabel	-	-	90	90	100			-
						Tercapainya laporan keuangan yang akuntabel		-				90	90	-
						Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	85							-
	01	01	1.02	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Tugas	-	-	5	0	-	-	-	-
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	-	-	-	-	1	-	-
	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pelaksanan Pengelolaan Keuangan	-	-	12	12	100	-	-	-

						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	-	-	-	-	1	-	-
	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas pegawai		-	80	80	100	80	160	-
						Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50	-	-	-	-	-	-	
	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas untuk ASN	-	-	70	70	100	-	-	-
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	-	-	-	-	1	1	-
	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan	-	-	34	43	126,5	-	-	-
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	-	-	-	-	20	-	-
	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi	-	-	12	2	16,7	-	-	-
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	-	-	-	-	5	-	-
	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	-	-	80	80	100	90	-	-
						Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	50	-	-	-	-	-	-	-
	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai	-	-	36	36	100	-	-	-
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	-	-	-	-	1	-	-
	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan	-	-	50	30	60	-	-	-
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	-	-	-	-	2	-	-

	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	-	-	70	72		20	-	-
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	-	-	-	-	-	-	-
	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnya pelayanan kantor	-	-	85	85	100	85	-	-
						Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	85	-	-	-	-	-	-	-
	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kerja	-	-	96	96	100	-	-	-
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	-	-	-	-	68	-	-
	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	-	-	85	85	100	85	-	-
						Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	-	-	-	-	-	-	-
	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat	-	12	1	1	100	-	-	-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	-	-	-	-	4	-	-
	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi/Internt yang tersedia	-	-	12	12	100	-	-	-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	-	-	-	-	12	-	-
	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	-	-	12	12	100	-	-	-
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12	-	-	-	-	12	-	-
	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-	-	85	85		85	-	-

						Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80	-	-	-	-	-	-	-
	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	-	-	1	1	100	-	-	-
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	-	-	-	-	1	-	-
	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	1	0	n/a	-	-	-
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	-	-	-	-	-	-	-
	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja	-	-	22	17	77,27	-	-	-
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	-	-	-	-	22	-	-
	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	-	100	-	-	-	-	-	-
						Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	-	(8/9)	3 (9/9)	(8/9)	89%	3	-	-
						Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	30	0	0	10%	n/a	-	-	-
	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	100	-	-	-	-	-	-

						Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	3	3	100	-	-	-
						Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	-	-	-	-	-	88	-	-
						Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	4	-	-	-	-	-	-	-
	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan strategi pengadaan yang barang dan jasa yang dilaksanakan	-	12	1	1	100	-	-	-
						Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	1	-	-
	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket yang di tender	-	650	-	-	-	-	-	-
						Jumlah sanggah lelang melalui LPSE	-	5	-	-	-	-	-	-
						laporan Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa	-	12	-	-	-	-	-	-
						Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa tender dan non tender	-	-	2	2	100	-	-	-
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	2	-	-
	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	laporan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	-	12	-	-	-	-	-	-
						Jumlah laporan monitoring pengadaan barang dan jasa	-	-	2	2	100	-	-	-
						Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	2	-	-
	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	3	-	-	-	-	-	-
						Persentase layanan Pengadaan secara elektronik		-	95	95	100	95	-	-

						Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	1	-	-	-	-	-	-	-
	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	-	12	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Layanan LPSE	-	-	700	535	76,4	-	-	-
						Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	-	-	-	-	2	-	-
	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	laporan pelaksanan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa (3 Sistem)	-	12	2	2	100,0	-	-	-
						Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	2	-	-
	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan elektronik yang dilayani	-	700	-	-	-	-	-	-
						Laporan pelaksanaan pengelolan informasi pengadaan barang dan jasa	-	12	-	-	-	-	-	-
						Jumlah User yang dilayani	-	700	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	2	-	-
	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	3	-	-	-	-	-	-
						Persentase Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	80	80	100	87,5	-	-
						Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4	-	-	-	-	-	-	-
	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM yang diberi Pembinaan	-	100	250	292	116,8	-	-	-

						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	200	-	-
	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	laporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	-	12	11	11	100	-	-	-
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	1	-	-
	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	laporan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	-	12	9	6	66,67	-	-	-
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	1	-	-
					Biro Organisasi									
	4.01.0.00.0.00.03.0000	Sekretariat Daerah												
	4.01.0.00.0.00.03.0004	Biro Organisasi												
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi	0	82	83	83	100,00	84	0	
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82	0	0	0	0,00	0	0	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	0	90	100	92	92,00	0	0	
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	0	0	0	0	0	1	0	
						Persentase realisasi anggaran	100	0	0	0	0	0	0	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Administrasi Keuangan	0	12	12	12	100,00	0	0	

						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	0	0	0	0,00	1	0	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	0	100	100	100	100,00	0	0	
						Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	0	0	0	0	0	100	0	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan BMD	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	0	0	0	0	1	0	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	0	0	100	0	0,00	0	0	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	0,00	7	0	
						Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	0	0	0	0,00	0	0	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	2	0	0	0	0,00	2	0	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	0	7	0	0,00	9	0	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	0	100	100	95	95,00	0	0	
						Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Organisasi	0	0	0	0	0,00	100	0	
						Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100	0	0	0	0,00	0	0	

						Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	100	35	35,00	0	0	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	0	0	0	0,00	3	0	
						Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	0	0	1580	1200	75,95	0	0	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	2	0	
						Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		12	12	12	100,00	0	0	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	2	0	
						Jumlah Kunjungan Tamu	0	95	95	60	63,16	0	0	
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	0	0	0	0,00	1	0	
						Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	0	0	164	162	98,78	0	0	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	0	0	0	0,00	1	0	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	0	0	0	0,00	2	0	
						Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	100	100	100	100,00	0	0	
						Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Organisasi)	0	0	0	0	0,00	100	0	
						Persentase pemenuhan BMD	100	0	0	0	0,00	0	0	
						Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	0	10	10	100,00	15	0	

						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	100	100	75	75,00	0	0	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	12	0	
							Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	0	0	0	0,00	0	0	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Surat Masuk dan Keluar	0	1	1	0	0,00	0	0	
							umlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	0	0	0,00	1	0	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	0	1	12	12	100,00	0	0	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	1	0	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	0	100	100	100	100,00	0	0	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	0	0,00	100	0	
							Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	0	0	0	0,00	0	0	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	0	16	12	12	100,00	0	0	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	0	0	0	0,00	18	0	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	0	10	20	20	100,00	0	0	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	0	0	0	0,00	21	0	
						PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar	0	92	95	91,89	96,73	97	0	

						Prosedur Kriteria (NSPK)													
						Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (Baik)	0	77	79	77,89	98,59	81	0						
						Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	0	0	0	0	0,00	89	0						
						Indeks Kelembagaan	72	0	0	0	0,00	0	0						
						Indeks Kematangan Organisasi	44	0	0	0	0,00	0	0						
						Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1	0	0	0	0,00	0	0						
						Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	40	0	0	0	0,00	0	0						
						Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	86	0	0	0	0,00	0	0						
						Indeks Kematangan Organisasi	0	42	42	42	100,00	0	0						
						Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	0	0	0	0	0,00	100	0						
						Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	0	0	0	0	0,00	96	0						
						Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100	0	0	0	0,00	0	0						
						Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	100	0	0	0	0,00	0	0						

						Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kelembagaannya	0	37	37	37	100,00	0	0	
					Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Hasil Evaluasi Kematangan Organisasi	0	37	37	37	100,00	0	0	
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	2	0	0	0	0,00	1	0	
						Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelembagaannya	0	10	10	10	100,00	0	0	
					Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Usulan Fasilitasi Kelembagaan Kab / Kota yang ditindaklanjuti	0	100	50	50	100,00	0	0	
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	1	0	
						Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	0	37	37	37	100,00	0	0	
						Laporan Evaluasi Jabatan	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Anjab dan ABK nya	0	10	10	10	100,00	0	0	
					Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Standar Kompetensi	0	10	10	10	100,00	0	0	
						Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Penyusunan Formasi Pegawai	0	10	10	10	100,00	0	0	
						Persentase Usulan Anjab dan ABK Kab Kota yang dilakukan Validasi	0	100	50	50	100,00	0	0	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2	0	0	0	0,00	1	0	
					Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rata - rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0	65	65	78,1	120,15	0	0	

						Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	0	0	0	0	0,00	100	0	
						Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90	0	0	0	0,00	0	0	
						Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	100	0	0	0	0,00	0	0	
						Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 - 2023	0	1	1	1	100,00	0	0	
					Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Fasilitasi Evaluasi Reformasi Birokrasi	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	0	0	0	0,00	1	0	
						Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan LKJiP	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Jumlah PD yang difasilitasi Evaluasi AKIP	0	1	1	1	100,00	0	0	
					Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah PD yang difasilitasi Penerapan / Penguatan SAKIP	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Jumlah Kab / Kota yg dilakukan Monitoring dan Pembinaan SAKIP	0	10	10	10	100,00	0	0	
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3	0	0	0	0,00	1	0	
						Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan penerapan Budaya Kerja	0	37	37	37	100,00	0	0	
					Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang membentuk Kelompok Budaya Kerja	0	37	37	37	100,00	0	0	

						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	0	0	0	0,00	1	0	
					Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Laporan Fasilitasi Evaluasi SOP Perangkat Daerah	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Dokumen peta Proses Bisnis	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Laporan Fasilitasi Tata Naskah Dinas	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Laporan Fasilitasi Pakaian Dinas	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3	0	0	0	0,00	1	0	
					Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitasi dan Evaluasi standar pelayanan terhadap Perangkat Daerah	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Fasilitasi dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Fasilitasi Evaluasi Unit Pelayanan Publik	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Laporan Binwas dan Monitoring terhadap Kab/Kota penyelenggaraan Pelayanan Publik	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3	0	0	0	0,00	1	0	
					Biro Umum									
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,00	79,81	83	83,3	100,36%	84	84,37	100,44%
						Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	-	-	-
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	-	-	-	100%	50,00%	50,00%

						Administrasi Umum Pada Biro Umum								
4	01	01	1.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100%	6 Paket	3 Paket	50,00%
4	01	01	1.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	102 Jenis	12 Laporan	12 Laporan	100%	6 Paket	2 Paket	33,33%
4	01	01	1.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	385 Paket	261600 Porsi	12 Laporan	12 Laporan	100%	225 Paket	112 Paket	49,78%
4	01	01	1.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	14 Paket	4 Paket	28,57%
4	01	01	1.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
4	01	01	1.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1920 Laporan	750 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	1920 Orang/Perjalanan	960 Orang / Perjalanan	50,00%
4	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1500 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%
4	01	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	450 Orang	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40,11%	40,11%
4	01	01	1.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	20 Unit	12 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	111 Unit	55 Unit	49,55%
4	01	01	1.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	-	-	-	-	-	-	-
4	01	01	1.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150 Unit	200 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	150 Unit	46 Laporan	30,67%

4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,00%	50,00%
4	01	01	1.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1000 Surat	2100 Lembar	2100 Lembar	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
4	01	01	1.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1000 Mbps 155736 M3 1337616 Kwh	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
4	01	01	1.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
4	01	01	1.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137500 m2	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	31,45%	31,45%
4	01	01	1.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit	150 Unit	150 Unit	150 Unit	100%	80 Unit	40 Unit	50,00%
4	01	01	1.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	447 Unit	-	-	-	-	447 Unit	222 Unit	49,66%
4	01	01	1.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	2 Unit	15,38%
4	01	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	325 Unit	150 Unit 150 Jenis	150 Unit	150 Unit	100%	325 Unit	35 Unit	10,77%
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	62,50%	62,50%
4	01	01	1.11	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	24 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Orang/Bulan	2 Orang / Bulan	100,00%

4	01	01	1.11	002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	100%	8 Paket	2 Paket	25,00%
4	01	01	1.11	003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	-	-	-	100%	8 Orang	2 Orang	25,00%
4	01	01	1.11	004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	-	-	-	100%	2 Orang/Bulan	2 Orang / Bulan	100,00%
4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45,66%	45,66%
4	01	01	1.12	001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	100 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	17 Paket	8 Paket	47,06%
4	01	01	1.12	002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	100 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	17 Paket	8 Paket	47,06%
4	01	01	1.12	003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	100 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	28 Paket	12 Paket	42,86%
					Biro Administrasi Pimpinan									
	1				Urusan									
	1	01			Bidang Urusan									
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan	86	83	84	84	100	85	27	31,40
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90	100	100	100	100	100	25	27,78
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	2	2	9	450	2	2	22,22

					Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja lingkup Setda	4	4	4	4	100	4	2	50,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik	90	100	100	100	100	100	25	27,78
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan ASN	12	12	12	12	100	12	5	41,67
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	90	100	100	100	100	100	25	27,78
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan hasil pendidikan dan pelatihan	4	4	4	4	100	4	2	50,00
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda	2	2	2	2	100	2	1	50,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	100	100	100	100	100	100	111,11
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan Alat tulis kantor	12	12	12	12	100	12	5	41,67
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	12	12	12	12	100	15	6	50,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	160	160	160	160	100	160	70	43,75
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang diadakan	1000	1000	1000	627	62,7	1000	450	45,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	100	100	100	100	100	100	111,11
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	5	5	5	5	100	5	2	40,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	100	100	100	100	100	100	111,11
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya (STNK) dan dipelihara	15	15	15	15	100	15	6	40,00

					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	12	12	12	12	100	12	5	41,67
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	100	100	100	100	100	100	111,11
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12	12	12	12	100	12	5	41,67
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Listrik, dan Sumber Daya Air yang terbayarkan	12	12	12	12	100	12	5	41,67
					Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	100	100	100	100	100	100	100,00
					Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah dokumen naskah pidato dan presentasi	12	12	12	12	100	12	5	41,67
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen yang terpublikasi	12	12	12	12	100	12	5	41,67
					Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah dokumen penyediaan data yang terdokumentasi	12	12	12	12	100	12	5	41,67
					Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100,00
					Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah dokumen koordinasi acara kegiatan Pemda	4	4	4	4	100	4	2	50,00
					Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen kunjungan tamu yang terlayani	2	2	2	2	100	2	1	50,00
					Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah dokumen administrasi keprotokolan	2	2	2	2	100	2	1	50,00

Sumber: kompilasi data biro-biro di lingkup Setda Prov. Kaltim

2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilihat berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, pembinaan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah, dan dapat digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran.

Secara sederhana untuk mengukur Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, dapat diidentifikasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-			BIRO
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%			100			100			POD
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Sesuai Ketentuan				100%			100			100			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun				2 Dokumen			2			100			
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Keuangan Daerah Dengan Baik				1 Laporan			100			100			
	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN				12 Laporan			12			100			
	Laporan Pelaksanaan Pengelola Keuangan				12 Laporan			12			100			
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada perangkat daerah				100%			100			100			
	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis				6 Orang			2			33,33			

	Persentase tersedianya penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%			100			100			
	Jumlah Peralatan Kantor Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai				30 Unit			30			100			
	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan			12			100			
	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%			100			100			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat				12 Laporan			12			100			
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik				100%			100			100			
	Jumlah laporan Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara				40 Unit			40			100			
	Presentase Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat EKPPD "Tinggi"				70%			65			92,857			
	Presentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota Yang di Sepakati				80%			85			100,000			
	Jumlah Laporan Koodinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				3 Laporan			3			100			
	Jumlah laporan fasilitasi penataan wilayah				4 Laporan			4			100			

	Jumlah Kegiatan Koordinasi,fasilitasi dan konsultasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah				85 Jumlah			85			100			
	Jumlah laporan fasilitasi pejabat negara				3 Laporan			3			100			
	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan				4 Laporan			4			100			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				3 Laporan			3			100			
	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti				100%			100			100			
	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Pemerintah				1 Dokumen			1			100			
	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Badan Usaha/Swasta				1 Dokumen			1			100			
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama				1 Dokumen			1			100			
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan					100%			100,00%			100		
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran					2 Dokumen			2 Dokumen			100		
	Persentase Realisasi Keuangan					98%			100,00%			100		

	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelola Keuangan					12 Laporan			12 Laporan			100		
	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah					100%			100%			100		
	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Bimbingan Teknis					6 Orang			6 Orang			100		
	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah					100%			100%			100		
	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Laporan			12 Laporan			100		
	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12 Bulan			12 Bulan			100		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD					90 OT			90 OT			100		
	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%			100%			100		
	Jumlah benda pos yang disediakan					350 Lembar			350 Lembar			100		
	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis					12 Dokumen			12 Dokumen			100		
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik					100%			100%			100		

	Jumlah laporan Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara					12 laporan			12 laporan			100		
	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional					9 Unit			9 Unit			100		
	Persentase Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi					100%			100%			100		
	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12 Unit			12 Unit			100		
												100		
	Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh Predikat EKPPD "Tinggi"					80%			80%			100		
	Persentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota yang disepakati					90%			90%			100		
	Jumlah Laporan Koodinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum					3 Laporan			3 Laporan			100		
	Jumlah Laporan Fasilitas Penataan Wilayah					4 Laporan			4 Laporan			100		
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Fasilitas dan Konsultasi di bidang pelaksanaan otonomi daerah					85 Kegiatan			85 Kegiatan			100		
	Jumlah laporan fasilitasi pejabat negara					3 Laporan			3 Laporan			100		
	Jumlah Laporan Korrdinasi					4 Laporan			4 Laporan			100		

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan													
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					3 Laporan			3 Laporan			100		
	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti					100%			100%			100		
	Jumlah Laporan Kerjasama Antar Pemerintah					1 Laporan			1 Laporan			100		
	Jumlah Laporan Kerjasama Antar Badan Usaha/Swasta					1 Laporan			1 Laporan			100		
	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama					1 Laporan			1 Laporan			100		
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan						100							
	Jumlah Dokumen Perencanaan						2 Dokumen							
	Persentase Realisasi Keuangan						98							
	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan						12 Laporan							
	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah						100							
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						6 orang							

	Persentase laporan pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah						100						
	Jumlah Laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						12 Laporan						
	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan						12 Laporan						
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						90 Laporan						
	Persentase jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang terealisasi						100						
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						12 Unit						
	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah						100						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						350						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan						
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik						100						
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan						9 Unit						

	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						12 Laporan							
	Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh Predikat EKPPD "Tinggi"						80%							
	Persentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota yang disepakati						90%							
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum						3 Dokumen							
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah						4 Dokumen							
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di bidang pelaksanaan otonomi daerah						85%							
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD						3 Dokumen							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan						4 Dokumen							
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						3 Laporan							
	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti						100%							

	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi						1 Dokumen							
	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi						1 Dokumen							
	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi						2 Laporan							
	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat				80%	83%	84%	82,998%	80,638%		103,75	97,15		Kesra
	Persentase Realisasi Keuangan				91%	92%	92%	81%	93,61%		89,01	101,75		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		100	100		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		100	100		
	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu				100%	100%	100%	100%	100%		100	100		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	2 Orang	4 Orang	0	2 Orang		0	100		
	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		100	100		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	17 Paket	53 Paket	12 Laporan	17 Paket		100	100		

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		100	100		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Laporan	12 Paket	12 Paket	12 Laporan	12 Paket		100	100		
	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		100	100		
	Jumlah Surat atau dokumen yang dikirim				1000 Laporan			900 lembar			90			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan			100		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	12 Laporan		0	100		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						17 Laporan				0	0		
	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik				90%	90%	90%	90%	90%		100	100		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	18 Unit	10 Unit	7 Unit	18 Unit		70	100		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	18 Unit	20 Unit	25 Unit	18 Unit		100	100		

	Persentase kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi				90%	90%	90%	90%	100%		100	111,11	
	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang disiapkan				90%	90%	100%	90%	100%		100	111,11	
	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Sarana dan Prasarana Spiritual					160 Unit	100 Unit		163 Unit			101,88	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				1 Dokumen			1 Dokumen			100		
	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi					10 lembaga	10 Lembaga		9 lembaga			90	
	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				1 Dokumen			1 Dokumen			100		
	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti				90%	90%	100%	90%	100%		100	111,11	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				2 Dokumen	15 Dokumen	13 Dokumen	2 Dokumen	15 Dokumen		100	100	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				1 Dokumen	16 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	16 Dokumen		100	100	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi,				2 Dokumen	10 Dokumen	13 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen		100	100	

	dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial													
	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti				90%	90%	100%	90%	100%		100	111,11		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				3 Dokumen	11 Dokumen	13 Dokumen	3 Dokumen	11 Dokumen		100	100		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				3 Dokumen	13 Dokumen	20 Dokumen	3 Dokumen	13 Dokumen		100	100		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				3 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen		100	90		
	Persentase pelayanan publik pada Biro Hukum				85	87	89	85	87		100	100		Biro Hukum
	Persentase penatausahaan				100	100	100	100	100		100	100		

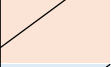
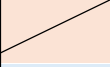
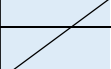
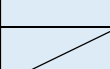
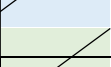
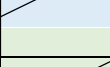
	Kuangan SKPD yang Baik												
	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan				12	12	12	12	12		100	100	
	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah laporan penatausahaan BMD				12	12	12	12	12		100	100	
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah				0	100	100	0	100		100	100	
	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat				0	3	2	0	3		100	100	
	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah				100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah Laporan pengadaan ATK				12	12	12	12	12		100	100	
	Jumlah dan Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan				0	701	701	0	701		100	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan				12	12	12	12	12		100	100	
	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi				40	40	40	40	40		100	100	
	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah laporan pengadaan perlengkapan kantor				1	1	1	1	1		100	100	

	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1	1	1	1	1		100	100	
	Jumlah benda pos yang disediakan				0	500	500	0	500		100	100	
	jumlah laporan gaji non ASN				12	12	12	12	12		100	100	
	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik										100	100	
	jumlah laporan pemeliharaan peralatan kantor				12	12	12	12	12		100	100	
	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non litigasi dan HAM				100	100	100	100	100		100	100	
	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah				100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah dokumen rancangan produk hukum pengaturan yang diharmonisasi				80	80	80	80	80		100	100	
	Jumlah dokumen surat keputusan yg ditetapkan				600	600	600	600	600		100	100	
	Jumlah dokumen produk hukum yang dipublikasikan				610	680	680	610	680		100	100	
	Jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota				250	250	250	250	250		100	100	
	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang				100	100	100	100	100		100	100	

	Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan													
	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum				10	10	10	10	10		100	100		
	Jumlah laporan Non Litigasi dan HAM				2	2	2	2	2		100	100		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan													Biro Ekonomi
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan				100%	100%	8 Dokumen	100%	100%		100%	100%		
	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran				4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	4 Dokumen		100%	100%		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	4 Dokumen		100%	100%		
	Persentase Realisasi Keuangan				90%	92%	95%	73%	85,94%		81%	95,49%		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Daftar	12 Laporan	3 Dokumen	12 Daftar	12 Laporan		100%	100%		
	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%		
	Persentase Pelaporan Administrasi					100%	100%		100%					

	Kepegawaian pada Perangkat Daerah													
	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai					28 Laporan	25 Dokumen		26 Orang			92,86%		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					14 Orang	3 Orang		9 Orang			64,29%		
	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%			100%		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Unit	12 Laporan	50 Paket	7 Unit	12 Laporan		100%	100%		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Pak	600 Porsi	25 Paket	12 Pak	540 Porsi		100%	90,00%		
	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1600 Lembar	12 Laporan	2 Paket	1000 Lembar	12 Laporan		62,50%	100%		
	Jumlah Laporan Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar				4 Terbitan	12 Laporan	96 Eksemplar	4 Terbitan	12 Laporan		100%	100%		
	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi				45 kali	153 OT	120 Laporan	31 kali	124 OT		68,89%	81,05%		
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik					100%	100%		100%			100%		
	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Kantor					1 Laporan	4 unit		1 Laporan			100%		
	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	100%	100%	100%	100%					

	Jumlah benda pos yang disediakan				200 Lembar	120 Lembar	1 Laporan	90 lembar	114 Lembar		45%	57%	
	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		100%	100%	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		100%	100%	
	Jumlah Laporan Peralatan/Perlengkapan Kantor yang dipelihara				12 Unit	12 Laporan	25 Unit	12 Unit	12 Laporan		100%	100%	
	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian				90%	95%	100%	100%	96,77%		111,11%	96,77%	
	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	6 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				1 Laporan	2 Laporan	3 Dokumen	1 Laporan	2 Laporan		100%	100%	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				1 Laporan	1 Laporan	3 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	
	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				1 Laporan	1 Laporan	7 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	
	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan				1 Laporan	6 Laporan	3 Dokumen	1 Laporan	6 Laporan		100%	100%	

	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				1 Laporan	2 Laporan	2 Dokumen	1 Laporan	2 Laporan		100%	100%		
	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				1 Laporan	2 Laporan	2 Dokumen	1 Laporan	2 Laporan		100%	100%		
	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				1 Laporan	1 Laporan	3 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%		
	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Laporan	4 Laporan	10 Dokumen	1 Laporan	4 Laporan		100%	100%		
	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%		
	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%		
	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	-	-	-	Level 3	Level 3	PKP-PB Pro Aktif	8/9						Biro PBJ
	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	88	90	100						
	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	1	12						

	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	2	12						
	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	2	12						
	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	95	95	95	100						
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	0	0	2	12						
	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	2	12						
	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	3	700						
	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	75	87,5	100						
	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa diberi Pembinaan	-	-	-	0	0	200	100						
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	1	12						
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis	-	-	-	0	0	1	12						

	Pengadaan Barang dan Jasa												
	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Layanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	82	83	84	100					
	Tercapainya Laporan Keuangan yang Akuntabel	-	-	-	0	90	90	0					
	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan daerah	-	-	-	0	0	90	0					
	Meningkatnya Kapasitas Pegawai	-	-	-	0	80	-	0					
	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	-	0	0	1	0					
	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas fungsi	-	-	-	0	10	20	0					
	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	-	-	-	0	12	100	0					
	Meningkatnya Pelayanan Administasi Umum	-	-	-	0	90	90	0					
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	0	20	1	0					
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	0	50	1	0					
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	-	0	40	20	0					

	Meningkatnya Pelayanan Kantor	-	-	-	0	85	85	0						
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	0	20	20	0						
	Meningkatnya Pelayanan Administasi Umum	-	-	-	0	0	85	0						
	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	0	1	4	0						
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	0	12	12	0						
	Jumlah laporan pelaksanaan jasa pelayanan	-	-	-	0	12	12	0						
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	-	-	-	0	85	85	0						
	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	-	-	-	0	3	1	0						
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	-	-	-	0	6	2	0						
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	-	-	-	0	50	20	0						
	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%			80%			80,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan,				1Dokumen			1Dokumen			100,00			

Biro
Adbang

	penganggaran dan evaluasi kinerja													
	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD				1Dokumen			1Dokumen			100,00			
	Jumlah dokumen keuangan daerah				1Dokumen			1Dokumen			100,00			
	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Tugas				5Laporan			5Laporan			100,00			
	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan				12Laporan			12Laporan			100,00			
	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian				2Dokumen			2Dokumen			100,00			
	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan				8Laporan			2Laporan			25,00			
	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi				12Laporan			5Laporan			41,67			
	Jumlah dokumen administrasi umum				3Dokumen			0Dokumen						
	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai				57Unit			54Unit			94,74			
	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan				100Buku			100Buku			100,00			
	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi				20Laporan			20Laporan			100,00			
	meningkatnya pelayanan kantor				90%			85%			94,44			
	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat				12Laporan			12Laporan			100,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12Bulan			12Bulan			100,00			
	Jumlah Non ASN				25Orang			25Orang			100,00			

	Persentase BMD dalam kondisi baik				85%			80%			94,12			
	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan				8Unit			8Unit			100,00			
	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4Unit			4Unit			100,00			
	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja				30Unit			20Unit			66,67			
	Persentase Terlaksananya Koordinasi dalam Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah				100%			100%			100,00			
	Tersusunnya Dokumen LPPD				1Dokumen			1Dokumen			100,00			
	Dokumen Evaluasi dan Penyelenggaran Pemerintah				1Dokumen			1Dokumen			100,00			
	Persentase pengendalian administrasi Pembangunan				75%			70%			93,33			
	Tersusunnya Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				3Dokumen			3Dokumen			100,00			
	dokumen evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				12Laporan			12Laporan			100,00			
	laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				12Laporan			12Laporan			100,00			

	laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah I, Wilayah II dan Wilyah III				36Lapora n			36Laporan			100,00			
	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				3Dokume n			3Dokumen			100,00			
	Laporan Analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan				12Lapora n			12Laporan			100,00			
	Laporan Pelaksanaan pembangunan daerah				12Lapora n			12Laporan			100,00			
	Laporan Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembanguan yang telah dilaksanakan				2Laporan			2Laporan			100,00			
	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan					83%			84,03%			101,24		
	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (Biro Administrasi Pembangunan)					1Dokumen			1Dokumen			100,00		
	Laporan Pelaksanan Pengelolaan Keuangan					12Laporan			12Laporan			100,00		
	Jumlah dokumen administrasi pegawai					1Dokumen			1Dokumen			100,00		
	Tersedianya pakaian pegawai					33stel			33stel			100,00		
	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan					10Laporan			10Laporan			100,00		

	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi					12Laporan			12Laporan			100,00		
	Jumlah dokumen administrasi umum					3Dokumen			3Dokumen			100,00		
	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai					32Unit			32Unit			100,00		
	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan					10Buku			10Buku			100,00		
	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi					15Laporan			15Laporan			100,00		
	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3Dokumen			3Dokumen			100,00		
	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat					12Laporan			12Laporan			100,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi/Internet yang tersedia					12Bulan			12Bulan			100,00		
	Jumlah ASN					25Orang			25Orang			100,00		
	Jumlah BMD yang terpelihara					30unit			30unit			100,00		
	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan					1Unit			1Unit			100,00		
	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional					3Unit			3Unit			100,00		
	Terpeliharaannya Peralatan dan Kelengkapan Kerja					30Unit			30Unit			100,00		

	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan					100%			100%			100,00		
	Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan					75%			85,37%			113,83		
	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					3Dokumen			3Dokumen			100,00		
	Dokumen evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD					12Laporan			12Laporan			100,00		
	Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN					12Laporan			12Laporan			100,00		
	Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah I, Wilayah II dan Wilyah III					12Laporan			12Laporan			100,00		
	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					3Dokumen			3Dokumen			100,00		
	Laporan Analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan					4Dokumen			4Dokumen			100,00		
	Laporan Pelaksanaan pembangunan daerah					12Laporan			12Laporan			100,00		
	Laporan Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembanguan yang telah dilaksanakan					1Dokumen			1Dokumen			100,00		

	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan						84%						
	Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan						1Dokumen						
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1Dokumen						
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Administrasi Pembangunan						100%						
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan						15Paket						
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						100Orang						
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						100Orang						
	Jumlah dokumen administrasi umum						3Dokumen						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan						12Laporan						

	Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						10Paket						
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15Laporan						
	Meningkatnya pelayanan kantor (Biro Adbang)						85%						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12Laporan						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12Laporan						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12Laporan						
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)						85%						
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						1Unit						

	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						3Unit						
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						30Unit						
	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang						85%						
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						20Unit						
	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (Biro Administrasi Pembangunan)						1Dokumen						
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2Dokumen						
	Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan						100%						
	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan						80%						
	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						3Dokumen						

	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD						12Laporan							
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN						12Laporan							
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Wilayah II dan Wilyah III						6Laporan							
	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						3Dokumen							
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan						1Dokumen							
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah						12Laporan							
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah						1Dokumen							
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	0	0	0	69%	70%	71%	62,34%	72,67%	85,11%	90,35%	103,81 %	119,87%	B. Organisasi
	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal B (BAIK)	0	0	0	77%	79%	81%	78,38%	75,68%	89,19%	101,79%	95,80%	110,11%	

	Indeks Kelembagaan	0	0	0	66	67	69	65,64	68,14	71,528	99,45%	101,70 %	103,66%	
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (Persentase)	0	0	0	79%	79%	79%	81%	81%	81%	102,53%	102,53 %	102,53%	
	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten Kota menyampaikan hasil Penataan Evalauasi Kinerja Pelayanan Publik	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Persentase SOP Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	0	0	0	90%	95%	100%	78,38%	78,38%	78,38%	87,09%	82,50%	78,38%	
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Peta Proses Bisnis sesuai ketentuan	0	0	0	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan/Dokumen SAKIP sesuai Ketentuan (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Persentase Kabupaten Kota yang menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur Sesuai Ketentuan	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Persentase)	0	0	0	54%	54%	54%	70%	70%	70%	130,13%	130,13 %	130,13%	
	Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Budaya Kerja (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	92%	92%	92%	91,89%	91,89%	91,89%	

	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur kriteria (NSPK) (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	92%	92%	92%	91,89%	91,89%	91,89%	
	Persentase Kabupaten Kota yang Kelembagaan Organisasinya Sesuai Ketentuan (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Persentase Anjab dan ABK Perangkat Daerah dan UPTD yang disusun sesuai Ketentuan (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Persentase Perangkat Daerah dan UPTD yang menyampaikan hasil evaluasi jabatan sesuai ketentuan (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Persentase Kabupaten Kota yang telah menyusun Anjab dan ABK (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Persentase hasil rekomendasi terhadap hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat yang ditindaklanjuti	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	0	0	0	3	3	3	3	3	3	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	0	0	0	2	2	2	2	2	2	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00 %	100,00%	

	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	0	0	0	2	2	2	2	2	2	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	0	0	0	2	2	2	2	2	2	100,00%	100,00 %	100,00%	

	Pendidikan dan Pelatihan (Orang)													
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	0	0	0	12	12	12	12	12	12	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	0	0	0	4	4	4	4	4	4	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	4	4	4	4	4	4	100,00%	100,00 %	100,00%	
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Biro Umum Setda Prov. Kaltim	-	-	-	80	83	84	Rp149.696.511.266,50	Rp174.371.413.578,72	-	82,68	83,76	-	Biro Umum
	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah dengan baik	-	-	-	100%	100%	100%	Rp66.763.939.658,00	Rp65.687.184.587,00	-	83,65%	80,03 %	-	

	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	500 Dokumen	14 Dokumen	373 Orang/Bulan	Rp66.010.072.854,00	Rp64.364.671.879,00	-	85,54%	80,02 %	-
	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	500 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp753.866.804,00	Rp1.322.512.708,00	-	28,54%	80,77 %	-
	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Sekretariat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	Rp43.580.800,00	Rp666.878.458,00	-	10,46%	96,69 %	-
	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	-	-	-	200 Dokumen	1 Laporan	12 Laporan	Rp43.580.800,00	Rp666.878.458,00	-	10,46%	96,69 %	-
	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	-	-	-		-	12 Laporan	-	-	-			-
	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Umum	-	-	-	100%	100%	100%	Rp7.527.851.687,00	Rp2.399.980.268,00	-	76,67%	87,31 %	-
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	400 Stel	358 Stel	3 Paket	Rp457.978.950,00	Rp521.553.000,00	-	79,46%	99,93 %	-
	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	-	-	-	300 Orang	1 Dokumen	4 Dokumen	Rp6.872.622.737,00	Rp1.437.727.268,00	-	77,09%	91,62 %	-
	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	100 orang	3 Laporan	125 Orang	Rp197.250.000,00	Rp440.700.000,00	-	60,24%	67,02 %	-
	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum pada Biro Umum	-	-	-	100%	100%	100%	Rp25.029.251.877,00	Rp22.489.581.281,00	-	95,33%	90,47 %	-
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	-	-	-	15 Jenis	15 Jenis	6 Paket	Rp191.408.000,00	Rp548.842.220,00	-	52,47%	94,42 %	-

	bangunan kantor yang disediakan													
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	102 Jenis	12 Laporan	6 Paket	Rp245.247.400,00	Rp499.330.000,00	-	65,32%	71,28 %	-	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	-	-	261600 Porsi	12 Laporan	225 Paket	Rp5.781.008.148,00	Rp5.240.549.400,00	-	97,73%	77,26 %	-	
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	5 Jenis	5 Jenis	14 Paket	Rp338.040.800,00	Rp718.703.000,00	-	77,59%	94,4 %	-	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	-	-	-	750 Dokumen	12 Laporan	1920 Orang/Perjalanan	Rp17.539.89.229,00	Rp14.640.35.961,00	-	98,95%	97,15 %	-	
	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	-	-	-	1500 Dokumen	2 Laporan	4 Dokumen	Rp429.656.050,00	Rp504.749.200,00	-	91,06%	84,4 %	-	
	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	-	-	-	450 Orang	3 Aplikasi	4 Dokumen	Rp503.902.250,00	Rp336.971.500,00	-	52,19%	92,22 %	-	
	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	Rp11.439.575.306,00	Rp19.665.150.241,00	-	61,73%	74,74 %	-	
	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	-	-	12 Unit	17 Unit	111 Unit	Rp7.703.451.550,00	Rp17.174.662.076,00	-	65,11%	73,16 %	-	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	-	200 Jenis	10 Jenis	150 Unit	Rp3.736.123.756,00	Rp2.490.488.165,00	-	55,75%	87,82 %	-
	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	Rp15.851.948.697,00	Rp22.938.449.719,00	-	74,59%	89,51 %	-
	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	1000 Surat	2100 Lembar	12 Laporan	Rp50.426.900,00	Rp44.664.300,00	-	51,99%	68,71 %	-
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	-	-	-	1000 Mbps 155736 M3 1337616 Kwh	12 Laporan	12 Laporan	Rp8.566.379.446,00	Rp9.267.719.228,00	-	68,18%	90,32 %	-
	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	-	-	137500 m2	12 Laporan	12 Laporan	Rp7.235.142.351,00	Rp13.626.066.191,00	-	84,23%	89,05 %	-
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	Rp13.404.172.643,50	Rp16.692.973.708,72	-	94,81%	88,28 %	-
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	-	-	-	150 Unit	150 Unit	80 Unit	Rp4.029.099.590,00	Rp6.620.185.025,00	-	98,25%	84,24 %	-
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	-	447 Unit	-	-	-	-	-	-
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	-	13 Unit	13 Unit	13 Unit	Rp7.462.364.147,50	Rp9.174.170.483,72	-	97,49%	90,86 %	-

	yang dipelihara/direhabilitasi													
	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	150 Unit 150 Jenis	160 Unit	325 Unit	Rp1.912.70 8.906,00	Rp898.618. 200,00	-	80,31%	94,87 %	-	
	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	Rp8.338.02 6.547,00	Rp10.820.3 50.440,00	-	99,91%	99,92 %	-	
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	-	-	-	24 Laporan	2 Laporan	2 Orang/Bul an	Rp8.338.02 6.547,00	Rp10.820.3 50.440,00	-	99,91%	99,92 %	-	
	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	-	-	-	-	-	8 Paket	-	-	-		-	-	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	8 Orang	-	-	-		-	-	
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	2 Orang/Bul an	-	-	-		-	-	
	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	100%	100%	Rp1.298.16 4.051,00	Rp13.010.8 64.876,00	-	39,09%	80,76 %	-	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	-	100 Kegiatan	1 Laporan	17 Paket	Rp209.772. 890,00	Rp3.477.48 4.142,00	-	28,55%	72,4 %	-	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil	-	-	-	100 Kegiatan	2 Laporan	17 Paket	Rp161.090. 810,00	Rp4.335.61 6.107,00	-	21,92%	76,02 %	-	

	Kepala Daerah yang Disediakan													
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-	-	-	100 Kegiatan	3 Laporan	28 Paket	Rp927.300.351,00	Rp5.197.764.627,00	-	50,08%	92,78 %	-	
	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%			100%			100%			Biro Adpim
	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan					84%	84%		97,44%	?		116,0%		
	Terselenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha				100%			100%			100%			
	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha					90%	90%		90%	?		100%		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen			2 Dokumen			100			
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9 Dokumen	9 Dokumen		9 Dokumen			100		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen			4 Dokumen			100			

	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen			100	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik				100%								
	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha					90%	90%						
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan				12 Laporan			12 Laporan			100		
	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan				12 Dokumen			12 Dokumen			100		
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen			100	
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah				100%								
	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha					90%	90%						
	Laporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan				24 Kegiatan			24 Kegiatan			100		
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen			100	

	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen			100	
	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%								
	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha					90%	90%						
	Jumlah Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor				12 Bulan			12 Bulan			100		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan			100	
	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan				12 Bulan			12 Bulan			100		
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					12 laporan	12 laporan		12 laporan			100	
	Jumlah Makanan & Minuman				12 Bulan			12 Bulan			100		
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor					1000 porsi	1000 paket		627 Porsi			62,70	
	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi				100 Kegiatan			100 Kegiatan			100		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					160 O/T	160 O/T		160 O/T			100	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang				100%								

	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan					100%	100%							
	Jumlah Sistem Penyedia Data dan Informasi				27 Laporan			27 Laporan			100			
	Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan					12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen			100		
	Jumlah Kerja Sama Media dan Informasi yang Tersampaikan				1210 Berita			1210 Berita			100			
	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan					12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen			100		
	Jumlah Kerja Sama Media				4 kegiatan			4 kegiatan			100			
	Jumlah Pengumpulan dan Penyediaan Data yang Terdokumentasi				24 Kegiatan			24 Kegiatan			100			
	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan					12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen			100		
	Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah				100%									
	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan					100%	100%							
	Jumlah Acara Kegiatan Pemda yang Terjadwalkan				121 Kegiatan			121 Kegiatan			100			
	Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen					
	Jumlah Tamu yang Terlayani				50 Tamu			50 Tamu			100			

	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen			100		
	Jumlah Administrasi Keprotokolan yang Terdokumentasi				109 Tamu			109 Tamu			100			
	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan					2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen			100		
	Persentase Terlaksananya Koordinasi dalam Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah				100%									
	Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Daerah				100%									
	Laporan Kerja Sama Antar Pemerintah				24 Laporan									
	Laporan Kerja Sama dengan Lembaga Non Pemerintah				24 Laporan									
	Jumlah Administrasi Kerja Sama yang Terdokumentasi				24 Dokumen									

Sumber: RPD Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 dan Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim

2.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten yang masing-masing membawahi 3 (tiga) biro yang dijabarkan sebagai berikut:

2.3.1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, dan hukum;

- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, dan hukum;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3.1.1 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah dibidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha.

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pemerintahan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD,

pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Otonomi Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerjasama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama

- badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3.1.2 Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang agama dan kesehatan;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan

kesejahteraan rakyat pelayanan dasar perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang kependudukan dan kesejahteraan sosial;

- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

- a. Bagian Bina Mental Spiritual;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual serta kelembagaan bina spiritual.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual; dan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan biro;

Bagian Bina mental membawahi Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III;

- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3.1.2 Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Hukum mempunyai fungsi:

- e. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- f. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- g. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Hukum, membawahkan :

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota; dan
- c. Bagian Bantuan Hukum.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kotamempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah,

pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II dan produk hukum Daerah wilayah III.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II, dan produk hukum Daerah wilayah III;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II, dan produk hukum Daerah wilayah III;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II, dan produk hukum Daerah wilayah III;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II dan produk hukum Daerah wilayah III; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Bantuan Hukum membawai Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha

2.3.2 Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa dan administrasi pembangunan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa dan administrasi pembangunan;

- c. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, dan administrasi pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3.2.1 Biro Perekonomian

Biro Perekonomian mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumberdaya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan

dengan tugasnya.

Biro Perekonomian, membawahi :

- a. Bagian Kebijakan Perekonomian;
- b. Bagian Sumber Daya Alam; dan
- c. Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian.

Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas :

- (1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- (3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha; dan
- (4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kebijakan Daerah membawahi Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi, dan Badan Layanan Umum Daerah serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, mempunyai tugas :

- a. penyiapan penyiapan bahan pengoordinasian

- perumusan kebijakan Daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3.2.2 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- e. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- f. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan

- secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- g. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :

- a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan pemantauan serta evaluasi pengadaan barang dan jasa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.

- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

- di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan sumber daya manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, serta tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

- di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3.2.3 Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor

yang mempengaruhi pencapaian tujuan Kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Administrasi Pembangunan, membawahi :

- a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
- c. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

- perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah membawahi Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III.

Untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian

administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;

- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- (3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan
- (4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah;

- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah;
- (3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah; dan
- (4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3.3 Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- g. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- h. Pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- j. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang, organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- k. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan

- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3.3.1 Biro Organisasi

Biro Organisasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Organisasi mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana;
- (2) Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana;
- (3) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- (4) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana; dan
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Organisasi, membawahi :

- a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
- c. Bagian Tata Laksana.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasi.

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- (3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- (4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- (3) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- (4) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik. Bagian Tata Laksana mempunyai fungsi :

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- (2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- (3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;

- (4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Laksana membawahi Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha

2.3.3.1 Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Biro Umum mempunyai fungsi :

- (6) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tatausaha;
- (7) penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tata usaha; dan
- (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Umum, membawahi :

- a. Bagian Rumah Tangga;
- b. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Bagian-bagian sebagaimana di maksud dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan,

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur dan urusan dalam.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Bagian Rumah Tangga fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, dan urusan dalam;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur dan urusan dalam; dan
- (3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset Sekretariat Daerah, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset dan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan dan persuratan dan arsip.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakandi bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan, dan persuratan dan arsip;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan danstafahli, pengelolaan kendaraan dan persuratan dan arsip; dan
- (3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Usaha, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Staf ahli yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha pimpinan dan staf ahli.

2.3.3.3 Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Biro Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol; dan

- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Administrasi Pimpinan, membawahi :

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- b. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan; dan
- c. Bagian Protokol.

Bagian sebagaimana masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, mempunyai fungsi :

- (1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian dan tata usaha;
- (2) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian dan tata usaha; dan
- (3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, membawahi Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di

bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 138, Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan; dan
- (3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pemantauan dan evaluasi bidang acara, tamu dan hubungan keprotokolan.

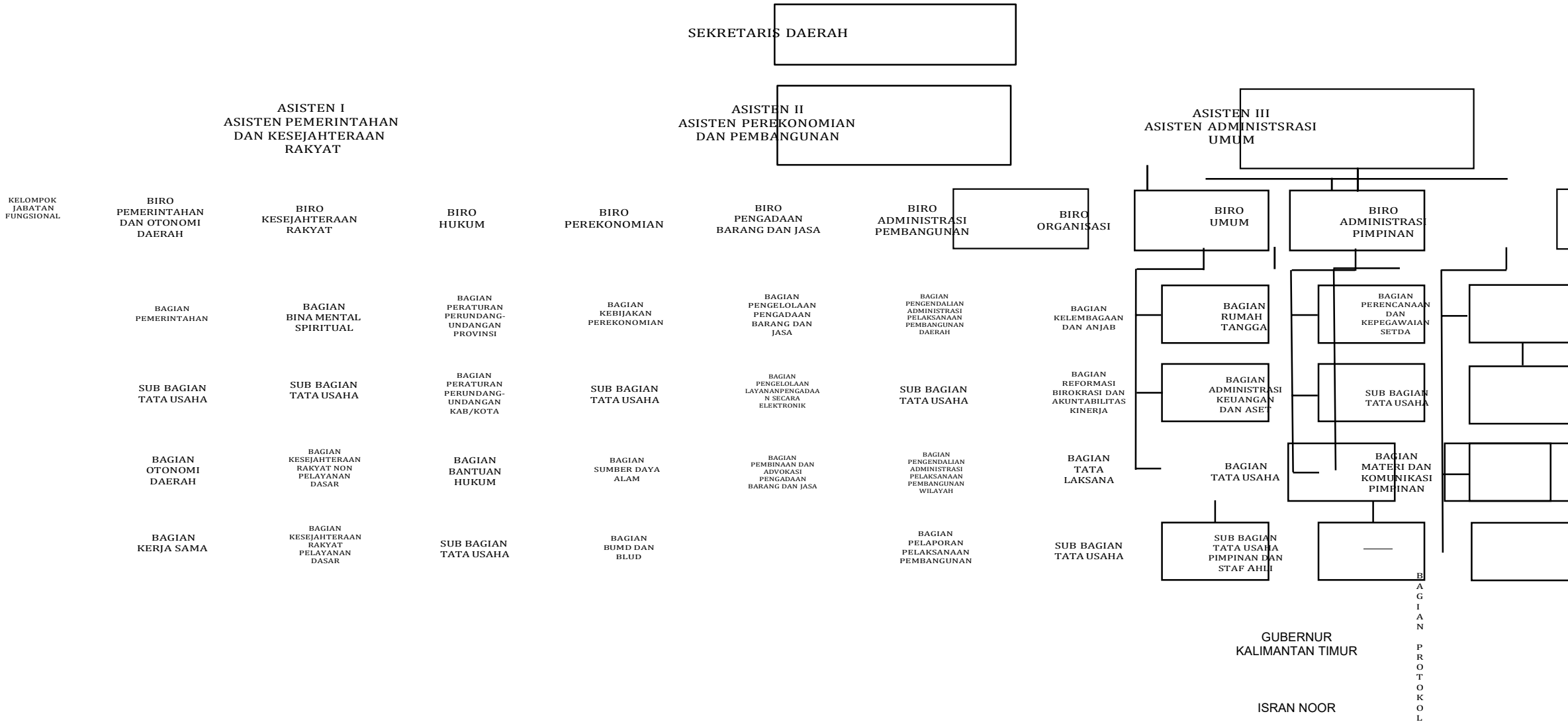
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 142, Bagian Protokol, mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang acara, tamu, dan hubungan keprotokolan;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang acara, tamu, dan hubungan keprotokolan; dan
- (3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) berada di bawah Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Setda, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol.

Berikut adalah diagram struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur dengan berbagai indikator yang menggambarkan kinerja. Berdasarkan realisasi kinerja dari berbagai indikator tersebut maka diketahui indikator apa saja dari masing-masing urusan yang sudah tercapai atau belum tercapai. Kinerja yang belum tercapai atau masih membutuhkan upaya untuk mencapai dan/atau mempertahankan kinerja menjadi masukan untuk merumuskan permasalahan pembangunan.

Permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang dipilah berdasarkan masalah pokok, masalah, dan akar masalah disajikan pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2. 3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi simplikasi dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintah	Belum optimalnya kinerja aparatur dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan	Kurangnya pemahaman secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaanya
		Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Biro Pemerintahan dan Biro Kesejahteraan Rakyat
		Data yang tersedia belum lengkap, akurat dan valid
		Belum optimalnya penanganan

		permasalahan perbatasan
		Belum optimalnya koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran di Perangkat Daerah
	Belum optimalnya target penawaran kerjasama	Kurangnya pemahaman penawaran kerjasama secara mendalam
	Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum secara kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum	Kurangnya pemahaman secara mendalam oleh ASN maupun Perangkat Daerah dalam menelaah ketentuan perundang-undangan dan produk-produk Hukum
	Belum optimalnya pengendalian pembangunan	Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.
	Belum optimalnya penerapan kebijakan dan prinsip serta ketaatan kode etik pengadaan barang dan jasa	Kurangnya penerapan prinsip, kode etik, dan kebijakan pengadaan barang dan jasa
	Belum optimalnya Penerapan SAKIP	Masih kurangnya penerapan akuntabilitas kinerja sebagai budaya kerja
		Belum optimalnya monitoring dan evaluasi guna perbaikan kinerja
	Belum optimalnya kualitas layanan	Belum optimalnya penyusunan, penetapan

	administrasi Pimpinan	dan penerapan standar pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Belum optimalnya penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

2.4.1 Penentuan Isu-isu Strategis

Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2. 4
Identifikasi Isu Strategis Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

No	Permasalahan/ Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan		BIRO
			Internal	Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung	Belum optimalnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Peningkatan kualitas layanan	Skor kepuasan masyarakat mencapai target	B.Umum

2	Kurang Maksimalnya peran BUMD dalam upaya peningkatan pendapatan daerah	Optimalisasi peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah	Penyamaan persepsi antara OPD/Pihat terkait tugas dan fungsi BUMD untuk peningkatan PAD	Kinerja BUMD yang baik	B. Ekonomi
	Belum tercapainya rasio elektrifikasi maksimal 100% di Kaltim	Belum meratanya distribusi listrik khususnya di daerah pedesaan (3T) terluar, terpencil, tertinggal	Kebijakan listrik desa dan daerah terpencil di Kaltim	Tersedianya akses/infrastruktur yang memadai Tersedianya jalur transmisi/jaringan PLN	
	Belum tercapainya bauran energi secara maksimal	Belum optimalnya dan masifnya penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kaltim	Kebijakan penggunaan EBT di Kantor Pemerintahan dan Industri Sosialisasi penggunaan EBT untuk Ketenagalistrikan	Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan energi alternatif (EBT) Mahalnya teknologi EBT	

	Kurangnya suplai/ketersediaan sumber air baku bagi masyarakat di daerah tertentu di Kaltim	Berkurangnya sumber air baku yang berasal dari air tanah Minimnya tangkapan air melalui embung, danau, bendungan , dll	Kebijakan strategis daerah pengelolaan air tanah dan permukaan	Kebijakan strategis pemerintah pusat untuk konservasi air tanah dan permukaan	
	Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam mengelola kebijakan di level provinsi	Regulasi yang masih dikendalikan dan dipegang oleh Pemerintah Pusat	Regulasi terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah	Regulasi dari Pemerintah Pusat	
	Belum optimalnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan & Lingkungan Hidup	Optimalisasi potensi Pendapatan Daerah melalui PI 10%	Regulasi dan Koordinasi Pemerintah Daerah terkait PI 10%	Kinerja Dirjen Migas, SKS Migas & KKKs	
	Belum Optimalnya upaya Pelestarian Danau Kaskade Mahakam	Optimalisasi upaya Pelestarian Danau Kaskade Mahakam	Regulasi terkait dengan upaya Pelestarian Danau Kaskade Mahakam	Kinerja & Koordinasi dengan Dinas terkait	

	Kurang maksimalnya penerapan peraturan daerah dalam mendukung penurunan emisi	Optimalisasi Penurunan Emisi melalui Kebijakan Daerah	Koordinasi antar Instansi/OPD terkait	OPD terkait dalam menerapkan peraturan daerah untuk penurunan emisi	
3	Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelaporan	Belum optimalnya kualitas kebijakan pembangunan	Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan yang terkendala dalam proses pelaksanaannya	proses persiapan, pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan SKPD dengan pihak penyedia terkait sekaligus sebagai penanggungjawab	Biro Adbang
		Belum optimalnya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah APBD	Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi terhadap penyediaan dokumen evaluasi dan laporan kinerja APBD	Kurangnya jumlah tim evaluator	

		Belum tepat waktu pelaporan pembangu nan daerah	Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi terhadap penyediaan dan penjunjang sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan	sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti sistem jaringan, listrik, dll	
4	Ketidaktersedia an bahan koordinasi, fasilitasi, monev pelaksanaan kebijakan yang tepat dan akurat	Keterbatas an kemampua n SDM dalam menyiapka n bahan koordinasi, fasilitasi, monev pelaksanaa n kebijakan yang tepat dan akurat	Jumlah Sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, monev pelaksanaan kebijakan yang tepat dan akurat	Berjalannya Pola Mekanisme Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah sesuai dengan Fungsinya	Biro Kesra
		Perencanaa n pelaksanaa n kegiatan yang belum mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah	Kebijakan dan regulasi ynag sudah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah	Sistem informasi perencanaan yang memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan	

5	Implementasi SAKIP dalam menuju goodgovernance masih belum optimal	Pentingnya membangun sistem akuntabilitas Kinerja, baik menyangkut perencanaan Strategis, program/kegiatan, penganggaran, perjanjian kinerja, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.	Jumlah Sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam Akuntabilitas Kinerja	Berjalannya Pola Mekanisme Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah sesuai dengan Fungsinya.	Biro Organisasi
6	Kurang perancang peraturan perundang-undangan dari Biro Hukum yang terlibat dalam proses pembentukan produk hukum daerah.	Optimalisasi pembinaan penyusunan produk hukum Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk mewujudkan produk hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Pengembangan kualitas SDM aparatur yang belum optimal di bidang Hukum	Adanya tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Biro Hukum
7	Belum terwujudnya birokrasi pelayanan publik yang berkualitas	mewujudkan birokrasi pelayanan publik yang berkualitas	1. Sarana dan prasana yang mendukung 2. Sinergitas dan kolaborasi antar bagian yang semakin meningkat	1. Komitmen Pimpinan terhadap tugas dan fungsi Biro Adpim 2. Adanya kebijakan yg mendukung pelaksanaan pelayanan Biro Adpim	Biro Adpim

				3. Tingginya permintaan fasilitasi pelayanan	
	Belum terwujudnya birokrasi yang akuntabel	mewujudkan birokrasi yang akuntabel	1. Sarana dan prasana yang mendukung 2. Terpenuhinya dokumen dukung dalam evaluasi SAKIP 3. Terlaksananya Monev Rencana Aksi pertriwulan 4. Komitmen pejabat dan staf	1. Kerja sama biro-biro dalam pengumpulan data dukung dokumen perencanaan 2. Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap penyusunan dokumen perencanaan	
	Skor EKPPD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 Belum ditetapkan dan di umumkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, sehingga masih dalam tahap Transisi/Perubahan.	Capaian keberhasilan atas IKK (Indikator Kinerja Kunci) LPPD untuk melihat kinerja Pemerintahan Daerah tidak dapat diketahui dibandingkan dengan Provinsi lain	Semua IKK sesuai kewenangan sudah dilaporkan oleh Perangkat Daerah dan dikompilasi dalam LPPD	Ada beberapa kewenangan khususnya terkait dengan pertambangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat masih menjadi IKK pada Permendagri No. 18 Tahun 2020	Biro POD

	Terbatasnya SDM pengelola PBJ	Kurang optimalnya pelaksanaan pemilihan pengadaan barang dan jasa pemerintah	1. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan SDM 2. telah disusun Anjab dan ABK Biro PBJ	1. dukungan dari BKD dalam percepatan pemenuhan SDM 2. telah tersedianya formasi pengelola	Biro PBJ
--	-------------------------------	--	--	--	----------

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan berkualitas, meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dan meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu didukung dengan program dan kegiatan yang mendukung.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah membandingkan antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam Ranwal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Data tersebut sedianya, dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2. 5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				13.008.264.000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				13.008.264.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100	Rp 4.179.414.720	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100	4.179.414.720	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pereangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	Rp 48.700.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pereangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	48.700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	24.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen (RKA, RKA-P)	24.350.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	24.350.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen (DPA, DPA-P)	24.350.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan	95%	151.800.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan	0,95	151.800.000	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 laporan	151.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 laporan (Keu, barang)	151.800.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	79.891.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	1	79.891.500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	79.891.500	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	79.891.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	2.530.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	2.530.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	80.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	80.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 laporan	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 laporan	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	2.400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	2.400.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	100%	499.690.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	1	499.690.500	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	499.690.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	499.690.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	100%	799.832.720	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	799.832.720	

			Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	442 Lembar	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	442 Lembar	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	791.832.720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	791.832.720	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	100%	69.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	100%	69.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Laporan	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Laporan	60.000.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		1. Persentase LPPD yang diLaporkan 2. Persentase kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah 3. Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi	100%	8.828.849.280	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		1. Persentase LPPD yang diLaporkan 2. Persentase kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah 3. Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi	100%	8.828.849.280	
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100%	2.863.504.480	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100%	2.863.504.480	

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	2.277.983.960	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen(Unra s, SPM, HUT RI)	2.277.983.960	
	Fasilitasi Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	585.520.520	Fasilitasi Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen (Pengadaan Tanah bagi pembangunan Utk Kepentingan Umum, Penegasan Batas Daerah, Penyelenggaraan Nama Rupabumi)	585.520.520	
	Pelaksanaan Otonomi Daerah		Persentasan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95%	3.865.344.800	Pelaksanaan Otonomi Daerah		Persentasan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	0,95	3.865.344.800	
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	800.000.000	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	800.000.000	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	2.300.000.000	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	2.300.000.000	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	765.344.800	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	765.344.800	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	2.100.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	1	2.100.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah		Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	756.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah		Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	756.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta		Jumlah Kerja Sama Badan	20 Dokumen	630000000	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta		Jumlah Kerja Sama Badan	20 Dokumen	630.000.000	

			Usaha/Swasta yang Difasilitasi					Usaha/Swasta yang Difasilitasi			
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama	3 Laporan	714000000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama	3 Laporan	714.000.000	
1.	BIRO HUKUM				6.252.178.090	BIRO HUKUM				6.752.178.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Samarinda	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 %	1.777.098.880	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Samarinda	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 %	1.952.178.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100 %	103.920.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100 %	103.920.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	7.680.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	7.680.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	25.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	859.006.436	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	1.034.085.556	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Samarinda	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	134.693.884	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Samarinda	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	134.693.884	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Palaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	626.798.560	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Palaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	626.798.560	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	20.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	20.000.000	
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Samarinda	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	4.475.079.210	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Samarinda	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	4.800.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Samarinda	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	2.675.079.120	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Samarinda	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	2.900.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Samarinda	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100 %	1.800.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Samarinda	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100 %	1.900.000.000	
1.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	2.505.746.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	2.505.746.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Realisasi Keuangan	93%	321.000.000,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Realisasi Keuangan	93%	321.000.000,00	

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	302.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	302.000.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	37.000.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	37.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	37.000.000,00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	37.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	1.105.266.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	1.105.266.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	150.266.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	150.266.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	57.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	57.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	898.000.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	898.000.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	922.480.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	922.480.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.480.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.480.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	890.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	890.000.000,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	120.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	120.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	85.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	85.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	35.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	35.000.000,00	
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kaltim	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100%	194.612.211.600,00	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kaltim	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang ditindaklanjuti	100%	194.612.211.600,00	
		Kaltim	Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%			Kaltim	Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%		
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Kaltim	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang disiapkan	100	Rp 180.155.940.000	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Kaltim	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100	Rp 180.155.940.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	140.980.400.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	140.980.400.000,00	

	Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Kaltim	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	39.175.540.000,00	Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Kaltim	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	39.175.540.000,00	
	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Kaltim	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100%	10.017.550.000,00	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Kaltim	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100%	10.017.550.000,00	
	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12 Dokumen	8.617.550.000,00	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12 Dokumen	8.617.550.000,00	
	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	700.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	700.000.000,00	
	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12 Dokumen	700.000.000,00	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12 Dokumen	700.000.000,00	
	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Kaltim	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	100%	4.438.721.600,00	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Kaltim	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100%	4.438.721.600,00	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12 Dokumen	1.892.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12 Dokumen	1.892.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Dokumen	1.896.721.600,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Dokumen	1.896.721.600,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	650.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	650.000.000,00	
1.	BIRO PEREKONOMIAN					Biro Perekonomian					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	Kaltim dan Luar Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81	2.495.711.527	Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	Kaltim dan Luar Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81	2.495.711.527	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Realisasi Keuangan	95%	126.054.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Realisasi Keuangan	95%	126.054.000	

	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	126.054.000	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	126.054.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	70.667.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	70.667.500	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	18.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	18.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	32.667.500	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	32.667.500	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 paket	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 paket	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	90%	1.123.183.362	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	90%	1.123.183.362	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 paket	45.300.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 paket	45.300.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	18.016.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	18.016.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	96 Dokumen	7.756.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	96 Dokumen	7.756.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	120 laporan	1.002.110.562	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	120 laporan	1.002.110.562	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	234.275.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	234.275.200	
	Pengadaan Mebel	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	5 paket	36.075.000	Pengadaan Mebel	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	5 paket	36.075.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Peralatan/Perlengkapan Kantor yang dipelihara	14 unit	198.200.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Peralatan/Perlengkapan Kantor yang dipelihara	14 unit	198.200.200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	842.112.456	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	842.112.456	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah benda pos yang disediakan	1 laporan	4.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah benda pos yang disediakan	1 laporan	4.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Laporan	837.912.456	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Laporan	837.912.456	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99.419.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99.419.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim dan Luar Kaltim	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	53.709.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim dan Luar Kaltim	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	53.709.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Kantor	25 unit	18.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Kantor	25 unit	18.250.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	27.460.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	27.460.000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang	100%	13.137.769.473	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang	100%	13.137.769.473	

			Perekonomian yang difasilitasi					Perekonomian yang difasilitasi			
			Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	90%	1.808.000.000			Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	90%	1.808.000.000	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	1.595.000.000	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	1.595.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	1.200.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	1.200.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	395.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	395.000.000	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	11.542.769.473	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	11.542.769.473	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	10.744.369.473	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	10.744.369.473	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	400.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	400.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	398.400.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	398.400.000	

	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	1.808.000.000	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	1.808.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	1.000.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	1.000.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	363.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	363.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	445.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	445.000.000	
1.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				12.500.000.000	Biro Administrasi Pembangunan				12.750.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	80%	5.800.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	80%	6.050.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	260.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	260.000.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	260.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	260.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	145.377.520	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	145.377.520,00	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50 Stel	80.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50 Stel	80.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	15.377.520	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	15.377.520,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%	3.530.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%	3.780.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	4 Laporan	3.500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	4 Laporan	3.750.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	90%	100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	90%	100.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kaltim	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa	80%	1.631.105.480	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kaltim	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa	80%	1.631.105.480,00	

	Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	208.359.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	208.359.800,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.420.745.680	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.420.745.680,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85%	133.517.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85%	133.517.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	11.499.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	11.499.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	102.018.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	102.018.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000,00	
	PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kaltim	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan	80%	6.700.000.000,00	PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kaltim	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan	80%	6.700.000.000,00	

			daerah oleh perangkat daerah					daerah oleh perangkat daerah			
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80%	1.200.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80%	1.200.000.000,0 0	
			Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	80%	3.300.000.000			Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	80%	3.300.000.000,0 0	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	600.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	600.000.000,00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	600.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	600.000.000,00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I,II,III	2 Laporan	3.300.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I,II,III	2 Laporan	3.300.000.000,0 0	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II	2 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II	2 Laporan		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III	2 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III	2 Laporan		
	Pelaporan Pelaksanaan	Kaltim	Persentase Pelaporan Pelaksanaan	80%	2.200.000.000	Pelaporan Pelaksanaan	Kaltim	Persentase Pelaporan Pelaksanaan	80%	2.200.000.000,0 0	

	Pembangunan Daerah		Pembangunan Daerah			Pembangunan Daerah		Pembangunan Daerah			
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	600.000.000	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	600.000.000,00	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1.000.000.000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1.000.000.000,00	
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	600.000.000	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	600.000.000,00	
1.	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA				10.297.871.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa				10.297.871.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indek Kualitas Layanan Keskretariatan Biro PBJ	71	2.833.969.100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indek Kualitas Layanan Keskretariatan Biro PBJ	71	2.833.969.100,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	85	134.278.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	85	134278000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	1	133.278.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	1	134.278.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	1.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50	222.220.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50	222220000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	71.040.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	71.040.000,00	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	85.780.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	85.780.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	65.400.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	65.400.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	80	785.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	80	785000000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	90.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	90.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	45.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	45.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	650.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	650.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	85	165.345.465,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	85	165345465	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	165.345.465,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	165.345.465,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	80	1.466.427.635,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	80	1466427635	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5.222.400,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5.222.400,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	82.470.700,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	82.470.700,00	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.378.734.535,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.378.734.535,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80	60.698.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80	60.698.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	13.499.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	13.499.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	13.499.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	13.499.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	33.700.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	33.700.000,00	
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Kaltim	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	PKP - PBJ Pro Aktif	6.166.479.900,00	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Kaltim	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	PKP - PBJ Pro Aktif	6.166.479.900,00	
			Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	30	1.297.422.000,00		Kaltim	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	30	1.297.422.000,00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4	2.275.962.000,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4	2275962000	
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1	417.852.000,00	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1	417.852.000,00	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	879.570.000,00	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	879.570.000,00	

	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	978.540.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	978.540.000,00	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kaltim	Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan	1	2.633.982.900,00	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kaltim	Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan	1	2633982900	
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Kaltim	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	1.184.267.900,00	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Kaltim	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	1.184.267.900,00	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	755.300.000,00	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	755.300.000,00	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	694.415.000,00	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	694.415.000,00	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4	2.553.957.000,00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4	2553957000	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250	894.522.000,00	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250	894.522.000,00	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	971.875.000,00	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	971.875.000,00	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1	687.560.000,00	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1	687.560.000,00	
1.	BIRO ORGANISASI					Biro Organisasi					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82	2.088.046.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82	2.088.046.000,00	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100	115.440.200,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100	115.440.200,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	115.440.200,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	115.440.200,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	10.230.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	10.230.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	10.230.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	10.230.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100	85.217.500,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100	85.217.500,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	2	60.217.500,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	2	60.217.500,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	25.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	25.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90	1.185.674.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90	1.185.674.800,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	37.473.800,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	37.473.800,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	278.350.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	278.350.000,00	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	16.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	16.500.000,00	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	47.700.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	47.700.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	707.250.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	707.250.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	98.401.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	98.401.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	100	191.559.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	100	191.559.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	15	191.559.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	15	191.559.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	419.330.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	419.330.500,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	418.330.500,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	418.330.500,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	80.594.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	80.594.000,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	18	61.812.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	18	61.812.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	18.782.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	18.782.000,00	
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Indeks Kelembagaan	72	900.000.000,00	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Indeks Kelembagaan	72	900.000.000,00	
			Indeks Kematangan Organisasi	44	900.000.000,00			Indeks Kematangan Organisasi	44	900.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1	900.000.000,00			Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1	900.000.000,00	
			Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	40	900.000.000,00			Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	40	900.000.000,00	
			Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	86	1.800.000.000,00			Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	86	1.800.000.000,00	
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100	1.450.000.000,00	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100	1.450.000.000,00	
			Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks	100	750.000.000,00			Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks	100	750.000.000,00	

			Kematangan Organisasi					Kematangan Organisasi			
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota	2	750.000.000,00	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota	2	750.000.000,00	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota	1	700.000.000,00	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota	1	700.000.000,00	
	Penataan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2	750.000.000,00	Penataan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2	750.000.000,00	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90	1.100.000.000,00	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90	1.100.000.000,00	
			Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	100	2.100.000.000,00			Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	100	2.100.000.000,00	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	900.000.000,00	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	900.000.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3	900.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3	900.000.000,00	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	300.000.000,00	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	300.000.000,00	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	3	500.000.000,00	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	3	500.000.000,00	

	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	3	600.000.000,00	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	3	600.000.000,00	
1.	BIRO UMUM					BIRO UMUM					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,00	211.686.351.300,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,00	211.686.351.300,00	
			Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	100%	17.300.372.700,00			Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	100%	17.300.372.700,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100%	82.450.665.774,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100%	82.450.665.774,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan; Kota Samarinda ; Jakarta	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	373 Orang/Bulan	80.932.238.274,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan; Kota Samarinda ; Jakarta	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	373 Orang/Bulan	80.932.238.274,00	
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda ; Jakarta	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.518.427.500,00	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda ; Jakarta	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.518.427.500,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100%	1.165.320.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100%	1.165.320.000,00	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	522.000.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	522.000.000,00	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	643.320.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	643.320.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100%	3.241.204.800,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100%	3.241.204.800,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	1.021.980.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	1.021.980.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen	1.331.568.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen	1.331.568.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	125 Orang	887.656.800,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	125 Orang	887.656.800,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indonesia ; Luar Negeri	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100%	35.589.731.747,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indonesia ; Luar Negeri	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100%	35.589.731.747,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	270.249.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	270.249.500,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	497.466.100,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	497.466.100,00	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	385 Paket	15.413.575.197,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	385 Paket	15.413.575.197,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 Paket	733.290.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 Paket	733.290.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.265.361.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.265.361.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indonesia; Luar Negeri	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	1920 Laporan	16.937.196.650,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indonesia; Luar Negeri	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	1920 Laporan	16.937.196.650,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	210.828.800,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	210.828.800,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	4 Dokumen	261.764.500,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	4 Dokumen	261.764.500,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	23.080.078.849,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	23.080.078.849,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	20 Unit	8.440.470.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	20 Unit	8.440.470.000,00	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	7.630.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	7.630.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	150 Unit	7.009.608.849,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	150 Unit	7.009.608.849,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	26.808.206.440,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	26.808.206.440,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	83.700.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	83.700.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 Laporan	9.774.001.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 Laporan	9.774.001.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	2.659.168.400,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	2.659.168.400,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	14.291.337.040,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	14.291.337.040,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	23.989.971.045,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	23.989.971.045,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	200 Unit	7.241.459.200,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	200 Unit	7.241.459.200,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	447 Unit	856.184.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	447 Unit	856.184.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 Unit	15.660.077.845,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 Unit	15.660.077.845,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	325 Unit	232.250.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	325 Unit	232.250.000,00	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	15.361.172.645,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	15.361.172.645,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	1 Orang/Bulan	125.126.116,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	1 Orang/Bulan	125.126.116,00	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	4 Paket	94.738.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	4 Paket	94.738.000,00	

	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	435.000.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	435.000.000,00	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	14.706.308.529,00	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	14.706.308.529,00	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	17.300.372.700,00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	17.300.372.700,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	7.534.010.900,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	7.534.010.900,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2.640.703.500,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2.640.703.500,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	7.125.658.300,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	7.125.658.300,00	
1.	Biro Administrasi Pimpinan					Biro Administrasi Pimpinan					
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH					SEKRETARIAT DAERAH					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.170.682.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.170.682.000	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	849.152.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	849.152.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	563.940.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	563.940.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	285.212.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	285.212.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	514.441.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	514.441.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	514.441.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	514.441.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	434.507.900	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	434.507.900	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	309.668.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	309.668.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	124.839.900	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	124.839.900	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	1.702.754.287	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	1.702.754.287	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	282.099.853	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	282.099.853	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	82.882.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	82.882.800	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	12.049.491	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	12.049.491	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1.325.722.143	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1.325.722.143	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	621.716.450	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	621.716.450	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	621.716.450	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	621.716.450	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90%	1.909.113.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90%	1.909.113.700	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.489.220	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.489.220	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.879.624.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.879.624.480	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	61.406.550	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90%	61.406.550	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	51.019.750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	51.019.750	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.386.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.386.800	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100%	9.727.598.013	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100%	9.727.598.013	
	Penyiapan Materi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	558.383.600	Penyiapan Materi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	558.383.600	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	4.648.067.213	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	4.648.067.213	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	4.521.147.200	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	4.521.147.200	

	Fasilitasi Keprotokolan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100%	2.349.991.600	Fasilitasi Keprotokolan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100%	2.349.991.600	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	1.445.160.800	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	1.445.160.800	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	600.880.800	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	600.880.800	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	303.950.000	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	303.950.000	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan terhadap program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jejaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi SKPA.

Akan tetapi, pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, usulan tersebut merupakan masukan kegiatan dan sub kegiatan baru yang dirasa penting dan berasal dari Biro-Biro yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2. 6
Usulan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pereangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah		

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		1. Persentase LPPD yang diLaporkan 2. Persentase kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah 3. Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi		
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		
Fasilitasi Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah		
Pelaksanaan Otonomi Daerah		Persentases Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah		
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan		
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		
Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti		
Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah		Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi		
Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta		Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi		
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama		

2	BIRO HUKUM				
3	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				
4	BIRO PEREKONOMIAN				
5	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
6	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA				
7	BIRO ORGANISASI				
8	BIRO UMUM				
9	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	5	FCPF
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen yang terpublikasi	12	FCPF

Sumber: data-data Biro dilingkungan Setda

BAB III

Tujuan dan Sasaran

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional adalah analisa kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah, yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN.

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur Melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”**.

Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, maka visi Presiden tahun 2020-2024 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermanfaat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman padaseluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Strategi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada tahun 2023 berdasarkan arahan Presiden yang dituangkan pada RPJMN

tahun 2020-2024 sebagaimana di atas, pembangunan nasional diarahkan berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi. Selain itu pula telah ditetapkan 7 agenda pembangunan untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah dengan tujuan akhir yakni peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Pembangunan Ibukota Negara (IKN) dan Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya ke wilayah yang masuk administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten

Penajam Paser Utara dipastikan akan berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur.

Secara umum, persoalan lingkungan, ekonomi, dan kependudukan merupakan yang paling besar mendapatkan pengaruh. Selain aspek sosial yang melibatkan masyarakat adat lokal yang juga berpotensi menimbulkan munculnya beberapa upaya yang adaptif dan bersifat masif. Jika diurutkan dari besarnya pemberian dampak, maka aspek lingkungan dan kependudukan merupakan dua persoalan teratas. Selanjutnya, secara implementatif kedua aspek ini akan mempengaruhi ekonomi wilayah dengan potensi imbas kepada sektor sosial-budaya lainnya.

Bagian paling menguntungkan dari pemindahan IKN adalah akan adanya penyeimbangan di berbagai sektor dan secara langsung akan mendukung desentralisasi atau otonomi daerah secara menyeluruh.

Pemindahan IKN juga merupakan tantangan yang sangat positif bagi Pemerintah Pusat dan sekaligus Pemerintah Daerah dalam membuat peta dan membentuk desain baru dari seluruh skema pengembangan yang akan dilaksanakan. Bagi Kalimantan Timur secara khusus, dan pulau Kalimantan secara umum, tantangan yang paling besar adalah upaya merebut seluruh peluang yang telah dimulai melalui upaya-upaya pengarusutamaan pembangunan ekonomi hijau.

Reformasi Struktural menuju Tatanan Normal Baru Pasca COVID-19 Pandemi COVID-19 merupakan bencana yang bersifat global dan mempengaruhi seluruh struktur juga secara global. Dengan demikian dapat dipastikan seluruh sektor yang terkait dengan kesejahteraan rakyat telah, sedang, dan akan terdampak. Sehingga, secara bertahap penurunan produktivitas di dalam struktur masyarakat akan mengarah pada kemunculan kerentanan social.

Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah yang memiliki dinamika tertentu terutama pada sektor ketenagakerjaan, perindustrian, dan perdagangan tentu saja merasakan dampak yang cukup besar dan luas. Hal-hal yang paling urgen untuk ditindaklanjuti adalah persoalan retribusi dan pajak, alternatif bagi tenaga kerja yang di-PHK, dan kesulitan dalam pasokan bahan baku

industri. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sektor industri, ketenagakerjaan, dan perdagangan di atas mengimbuai seluruh sektor lainnya.

Berkurangnya jumlah penduduk yang bekerja membuat distribusi pangan tidak bisa tersalurkan dengan baik. Selain itu, urgensi untuk bekerja dari rumah juga menghambat tetap berjalannya produktivitas di bidang pangan yang ditandai oleh banyaknya terjadi gagal panen. Selain sektor pangan, industri-industri kecil juga mendapatkan penurunan pendapatan sehingga melemahkan daya beli masyarakat dan menciptakan kelesuan daya saing.

Salah satu upaya strategis Pemerintah Pusat dalam meredam dampak Pandemi COVID-19 ini adalah dengan melakukan reformasi struktural. Diharapkan reformasi struktural mampu memperbaiki fondasi-fondasi ekonomi Indonesia sehingga dapat mengakselerasi ketertinggalan akibat dampak negatif pandemi.

Presiden Joko Widodo memprioritaskan lima hal yang harus menjadi area fokus bagi program reformasi struktural, yaitu: (a) pengembangan SDM, (b) pembangunan infrastruktur, (c) deregulasi, (d) debirokratisasi, dan (e) mentransformasikan ekonomi. Peluang yang sangat berpotensi muncul dari bencana pandemi COVID-19 ini adalah pada reformasi birokrasi secara regional.

Kunci utama dari terjadinya reformasi industri tahap baru ini bisa dimulai dari kesepakatan global masyarakat dunia mengenai perlawanan terhadap COVID-19. Secara mendasar adanya konsensus nasional dan bahkan internasional ini akan memudahkan untuk melakukan reshaping aturan dan regulasi serta sistem pelayanan birokrasi, sehingga penanganan problem di seluruh sektor bisa dilakukan.

Berdasarkan visi dan misi Pembangunan Nasional yang mengacu pada RPJMN penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur juga memperhatikan isu pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Sebagai daerah asal wilayah IKN dan menjadi mitra pembangunan IKN, maka pada tahap awal pembangunan IKN yang sedang berlangsung saat ini, Provinsi Kalimantan Timur ini menangkap momentum tersebut dengan slogan pembangunan periode tahun 2024-2026 adalah **“MEMBANGUN KALTIM**

UNTUK NUSANTARA”.

Slogan ini memberi semangat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk membangun daerah dengan memposisikan bahwa Kaltim adalah bagian dari proses pembangunan IKN. Membangun Kaltim untuk Nusantara bermakna bahwa pembangunan tiga tahun kedepan disinergikan dengan pembangunan IKN. Pembangunan IKN akan memberi pengaruh besar bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, demikian juga sebaliknya sehingga dapat terwujud percepatan pembangunan kedua wilayah.

Ibu Kota Nusantara dan Kalimantan Timur sebagai Daerah Mitra direncanakan menjadi penggerak pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan serta Kawasan Timur Indonesia. Salah satu fokus pembangunan Kalimantan Timur dari aspek penataan ruang yakni mendukung pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua, melalui dukungan pengembangan IKN sebagai kota berkelanjutan, yang aman, modern, dan produktif, serta simbol identitas bangsa Indonesia, dan mengembangkan jaringan konektivitas antara IKN dengan wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 3(tiga) tahun, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously improve (SMART-C).

Tujuan dan sasaran dalam RPD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah serta

dituangkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara terinci pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	UNIT KERJA
Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK	Indeks Kualitas Kebijakan	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdayasaing	1	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	Persen	Biro Kesra
			2	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Persen	Biro POD
			3	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi		
			4	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi		
			5	Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM	Persen	Biro Hukum
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas	1	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang fasilitasi	Persen	Biro Perekonomian
			2	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian		
			3	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	Biro PBJ
			4	Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	Persen	Biro Adbang
		Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK	1	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	Poin	Biro Organisasi
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	1. Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai/Predikat)		1	Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/Predikat	Biro Adpim
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah(Indeks)		2	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	

Sumber: RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran serta program yang mendukung secara tidak langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penataan Organisasi, serta Program Perekonomian dan Pembangunan. Program yang mendukung secara tidak langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Administrasi Umum.

Perhitungan pagu anggaran program pada tahun keempat RENSTRA Sekretariat Daerah dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. Untuk pagu anggaran program pada tahun kelima diperhitungkan dengan angka perkiraan anggaran akan naik sebesar 10% dari tahun sebelumnya.

Rencana program, kegiatan Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut

Tabel 3. 2
Program Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdayasaing	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pereangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan
		4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan
		4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah
		4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah
		4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi

		4.01.01.1 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
		4.01.01.1 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		4.01.01.1 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		4.01.01.1 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik
		4.01.01.1 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1. Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				2. Persentase LPPD yang di laporkan
				3. Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi
		4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan
		4.01.03.1 .01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
		4.01.03.1 .01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah
		4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentases Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah
		4.01.03.1 .02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
		4.01.03.1 .02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan
		4.01.03.1 .02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
		4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti
		4.01.03.1 .03.01	Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi
		4.01.03.1 .03.02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi

		4.01.03.1 .03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat
		4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan
		4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		4.01.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		4.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
		4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		4.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik
		4.01.01.1.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		4.01.01.1.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu
		4.01.01.1.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		4.01.01.1.05.5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
		4.01.01.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum
		4.01.01.1.06.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
		4.01.01.1.06.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
		4.01.01.1.06.9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi
		4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang
		4.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

		4.01.01.1 .08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		4.01.01.1 .08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		4.01.01.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		4.01.01.1 .09.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		4.01.01.1 .09.6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi
				Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi
		4.01.04.1 .01	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi
		4.01.04.1 .01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola
		4.01.04.1 .01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi
		4.01.04.1 .02	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti
		4.01.04.1 .02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
		4.01.04.1 .02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
		4.01.04.1 .02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
		4.01.04.1 .03	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti
		4.01.04.1 .03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
		4.01.04.1 .03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

			Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		4.01.04.1 .03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan
		BIRO HUKUM		
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik
		4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan
		4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD
		4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah
		4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah
		4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan pengadaan ATK
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
		4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi
		4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pengadaan perlengkapan kantor
		4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan
		4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan gaji non ASN
		4.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	
		4.01.05.05.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	
		4.01.05.05.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah dokumen rancangan produk hukum pengaturan yang diharmonisasi	
				Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang di harmonisasi	
		4.01.05.05.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah dokumen surat keputusan yg ditetapkan	
				Persentase Keputusan Gubernur yang ditetapkan	
		4.01.05.05.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah dokumen produk hukum yang dipublikasikan	
				Persentase produk hukum Provinsi yang dipublikasikan	
		4.01.05.05.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota	
				Persentase Produk Hukum pengaturan Kab/kota yang difasilitasi/ evaluasi	
		4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	
		4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum	
				Persentase penanganan Perkara Litigasi	
				Persentase Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin	
		4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah laporan Non Litigasi dan HAM	
				Persentase masalah Non Litigasi	
				Jumlah Laporan Rencana Aksi HAM dan Kabupate/Kota Peduli HAM	
		BIRO PEREKONOMIAN			
	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan
				Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	umlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

	yang berkualitas		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik
			Pengadaan Mebel	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan/Perlengkapan Kantor yang dipelihara
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Kantor
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi
				Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha

			Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tercapainya laporan keuangan yang akuntabel
				Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas pegawai
				Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi
		1.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas untuk ASN
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
		1.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		1.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum
				Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan
		1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnya pelayanan kantor
				Presentase prasarana kantor yang terpenuhi
		1.1.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kerja
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum
				Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi/Internet yang tersedia
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik
				Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik
		1.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		1.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajakny
		1.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharaannya Peralatan dan Kelengkapan Kerja
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
				Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
				Variabel Domain Proses yang dilaksanakan
		7.1.01.1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan strategi pengadaan yang barang dan jasa yang dilaksanakan
				Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
		7.1.01.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa tender dan non tender
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

		7.1.01.3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan monitoring pengadaan barang dan jasa
				Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase layanan Pengadaan secara elektronik
				Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan
		7.1.02.1	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Layanan LPSE
				Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		7.1.02.2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa (3 Sistem)
				Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
		7.1.02.3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah informasi yang dilayani
				Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
				Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan
		7.1.03.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM yang diberi Pembinaan
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
		7.1.03.2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pelaksanan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
		7.1.03.3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II

				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilyah III
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
		BIRO ORGANISASI		
	Meningkatn ya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administras i dan birokrasi yang BerAHKLAK	X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi
		X.XX.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran
		X.XX.1.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)
		X.XX.1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		X.XX.1.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
		X.XX.1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
		X.XX.1.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)
		X.XX.1.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
		X.XX.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik
		X.XX.1.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)
		X.XX.1.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)
		X.XX.1.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		X.XX.1.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)
		X.XX.1.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)
		X.XX.1.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)
		X.XX.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD

		X.XX.1.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)
		X.XX.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu
		X.XX.1.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)
		X.XX.1.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)
		X.XX.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
		X.XX.1.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)
		X.XX.1.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		4.01.02.1.01	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan
				Indeks Kematangan Organisasi
				Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)
				Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)
				Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)
		4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan
				Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi
		4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi
		4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota
		4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
				Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan
		4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
		4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja

		4.01.02.1 .02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah
		4.01.02.1 .02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
		BIRO UMUM		
		04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum
				Persentase Keluhan Pimpinan yang ditindaklanjuti
		4.01.01.1 .02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik
		4.01.01.1 .02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
		4.01.01.1 .02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
		4.01.01.1 .03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah
		4.01.01.1 .03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD
		4.01.01.1 .03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaan barang milik daerah pada SKPD
		4.01.01.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum
		4.01.01.1 .05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
		4.01.01.1 .05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
		4.01.01.1 .05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
		4.01.01.1 .06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum
		4.01.01.1 .06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
		4.01.01.1 .06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
		4.01.01.1 .06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
		4.01.01.1 .06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
		4.01.01.1 .06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
		4.01.01.1 .06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

		4.01.01.1 .06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
		4.01.01.1 .06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD
		4.01.01.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
		4.01.01.1 .07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan
		4.01.01.1 .07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
		4.01.01.1 .07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
		4.01.01.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
		4.01.01.1 .08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat
		4.01.01.1 .08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan
		4.01.01.1 .08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
		4.01.01.1 .08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
		4.01.01.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
		4.01.01.1 .09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
		4.01.01.1 .09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
		4.01.01.1 .09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
		4.01.01.1 .09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
		4.01.01.1 .11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		4.01.01.1 .11.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
		4.01.01.1 .11.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan

		4.01.01.1.11.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		4.01.01.1.11.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		4.01.01.1.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		4.01.01.1.12.01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan
		4.01.01.1.12.02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
		4.01.01.1.12.03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keskretariat Biro Administrasi Pimpinan
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti
				Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan
			Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
			Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026, serta mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Penjabaran kegiatan yang terdapat di dalam program harus memiliki rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian kebijakan tersebut. Program yang dirumuskan sebaiknya memenuhi kriteria yang merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana, bentuk penjabaran lebih rinci langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan serta mengikat/mengelompokkan kegiatan sejenis.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Table 4. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	BIRO UMUM						228.986.724.000,00						226.136.525.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						228.986.724.000,00						226.136.525.000,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						228.986.724.000,00						226.136.525.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Biro Umum</i>	-			84 Indeks	228.986.724.000,00					-	226.136.525.000,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik</i>	-			100 %	82.450.665.774,00			-	-	-	82.536.587.149,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				373 Orang/ Bulan	80.932.238.274,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80.942.238.274,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				325 Unit	232.250.000,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		243.862.500,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			100 %	15.361.172.645,00			-	-		13.877.989.497,80	BIRO UMUM
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/Bulan	125.126.116,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		275.903.085,78	BIRO UMUM
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	94.738.000,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		208.897.290,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	435.000.000,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		959.175.000,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/Bulan	14.706.308.529,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12.434.014.122,02	BIRO UMUM

4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-			100 %	17.300.372.700,00			-	-	-	21.941.044.020,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				17 Paket	7.534.010.900,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7.910.711.445,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				8 Paket	2.640.703.500,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6.548.391.360,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah													
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				28 Paket	7.125.658.300,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7.481.941.215,00	BIRO UMUM
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						18.170.682.000,00						25.357.581.617,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						18.170.682.000,00						25.357.581.617,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						18.170.682.000,00						25.357.581.617,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	-			100 %	18.170.682.000,00					-	25.357.581.617,00	

		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	285.212.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		236.580.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	-			90 %	514.441.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		536.808.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4.01.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	514.441.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		536.808.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	124.839.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		203.311.200,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	-			90 %	1.702.754.287,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		2.331.551.001,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				150 Paket	282.099.853,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		294.365.064,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

[illegible]

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	1.325.722.143,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		1.938.126.156,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	-			90 %	621.716.450,00			-	-		735.867.600,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	621.716.450,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		735.867.600,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	-			90 %	1.909.113.700,00			-	-	-	2.286.192.176,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	29.489.220,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30.642.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.879.624.480,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2.255.549.376,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	-			90 %	61.406.550,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	64.076.400,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	51.019.750,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		53.238.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10.386.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10.838.400,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	-			100 %	9.727.598.013,00			-	-	-	15.176.830.440,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan													
		Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				12 Dokumen	558.383.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		791.356.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	4.648.067.213,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		6.537.320.040,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

		Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				2 Laporan	303.950.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-		327.600.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	BIRO HUKUM						6.752.178.000,00						6.278.494.616,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						6.752.178.000,00						6.278.494.616,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						6.752.178.000,00						6.278.494.616,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	-			85 %	1.952.178.000,00						1.873.495.160,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	-			100 %	103.920.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		103.920.000,00 - -	BIRO HUKUM
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	103.920.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		103.920.000,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	7.680.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		768.000,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7.680.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		768.000,00	BIRO HUKUM

4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Hukum	-			100 %	25.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	25.000.000,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		25.000.000,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	1.034.085.556,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	799.130.100,00	BIRO HUKUM

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	884.955.456,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		650.000.000,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	134.693.884,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		297.878.500,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	134.693.884,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		297.878.500,00	BIRO HUKUM

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	621.798.560,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		621.798.560,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-			100 %	20.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		20.000.000,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		20.000.000,00	BIRO HUKUM

		Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				750 Dokumen	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		300.000.000,00	BIRO HUKUM
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya													
		Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				700 Dokumen	734.715.720,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		559.715.720,00	BIRO HUKUM
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota													
		Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				350 Dokumen	1.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		870.329.336,00	BIRO HUKUM

		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	115.440.200,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		115.440.200,00	BIRO ORGANISASI
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	10.230.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	00 10.230.000,	BIRO ORGANISASI
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	10.230.000,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		00 10.230.000,	BIRO ORGANISASI

		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	25.000.000,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	-			90 %	1.185.674.800,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		1.185.674.800,00	BIRO ORGANISASI
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	37.473.800,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		37.473.800,00	BIRO ORGANISASI

		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	98.401.000,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		98.401.000,00	BIRO ORGANISASI
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	-			100 %	191.559.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	191.559.000,00	BIRO ORGANISASI
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	191.559.000,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		191.559.000,00	BIRO ORGANISASI

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	418.330.500,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		418.330.500,00	BIRO ORGANISASI
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-			100 %	80.594.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik	-	80.594.000,00	BIRO ORGANISASI
4.01.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	61.812.000,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		61.812.000,00	BIRO ORGANISASI

4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	18.782.000,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		18.782.000,00	BIRO ORGANISASI
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Indeks Kelembagaan Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	-			1 PD 72 Indeks 44 Indeks 85 % 70 %	5.400.000.000,00					-	5.549.761.000,00	

		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	700.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		730.000.000,00	BIRO ORGANISASI
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan													
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				2 Dokumen	750.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		780.000.000,00	BIRO ORGANISASI
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Peristiwa Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	-			100 % 90 %	3.200.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3.259.761.000,00	BIRO ORGANISASI

		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	24.350.000,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		27.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	24.350.000,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		25.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	-			95 %	151.800.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	151.800.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	79.891.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		90.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	-			100 %	2.530.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		2.848.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	80.000.000,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		88.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	50.000.000,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		60.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	2.400.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		2.700.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	-			100 %	499.690.500,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	550.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.01.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				29 Unit	499.690.500,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		550.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	799.832.720,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	800.832.720,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				442 Laporan	8.000.000,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		9.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	791.832.720,00	- Kota Samarinda , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		791.832.720,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				3 Dokumen	2.277.983.960,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		2.400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah													
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				3 Dokumen	585.520.520,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		650.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	-			95 %	3.865.344.800,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	4.280.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				3 Laporan	765.344.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		900.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	-			100 %	2.100.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	2.310.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah													
		Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				30 Dokumen	962.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		1.058.200.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta													
		Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				20 Dokumen	464.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	510.400.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama													
		Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				3 Laporan	674.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	741.400.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						13.408.257.600,00					8.592.661.000,00		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						13.408.257.600,00					8.592.661.000,00		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						13.408.257.600,00					8.592.661.000,00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP URUSAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	-			83 %	2.505.746.000,00				-	2.592.661.000,00		

		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola</i>				25 Unit	1.790.240.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		1.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual													
		<i>Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi</i>				10 Lembaga	1.856.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		800.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	<i>Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar</i>	-			100 %	2.817.550.000,00			-	-	-	2.100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan													
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</i>				12 Dokumen	1.417.550.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		700.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan													
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</i>				12 Dokumen	700.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		700.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial													

		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				12 Dokumen	700.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		700.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	-			100 %	4.438.721.600,00			-	-	-	2.100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata													
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				12 Dokumen	1.892.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		700.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja													
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				12 Dokumen	1.896.721.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		700.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan													
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				12 Dokumen	650.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		700.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	BIRO PEREKONOMIAN						17.441.481.000,00						17.585.267.864,00	

4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						17.441.481.000,00						17.585.267.864,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						17.441.481.000,00						17.585.267.864,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	-			90 %	2.495.711.527,00					-	2.317.706.864,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	-			95 %	126.054.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	126.054.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	126.054.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		126.054.000,00	BIRO PEREKONOMIAN

		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				25 Dokumen	18.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		0018.000.000,	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	32.667.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		0032.667.500,	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	-			100 %	1.123.183.362,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1.053.898.864,00	BIRO PEREKONOMIAN

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	1.002.110.562,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		946.165.744,00	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	234.275.200,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	00 99.796.500,	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	36.075.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		00 36.796.500,	BIRO PEREKONOMIAN

[illegible]

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.200.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		5.400.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	837.912.465,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		860.082.620,00	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	-			100 %	99.419.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik	-	101.407.380,00	BIRO PEREKONOMIAN

		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				2 Dokumen	1.200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		1.011.969.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro													
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				2 Dokumen	395.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		492.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-			100 %	11.542.769.473,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	11.574.592.000,00	BIRO PEREKONOMIAN

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				2 Dokumen	398.400.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		434.592.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-			100 %	1.808.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	2.189.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha													
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				10 Dokumen	1.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		1.260.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN

4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi													
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Dokumen	363.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		408.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah													
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	445.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		521.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						15.830.000.000,00						15.830.000.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						15.830.000.000,00						15.830.000.000,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						15.830.000.000,00						15.830.000.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	-			85 Indeks	6.310.000.000,00					-	6.310.000.000,00	

4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	260.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	260.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	260.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		260.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	145.377.520,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	145.377.520,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	15.377.520,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		0015.377.520,	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			80 %	3.546.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3.546.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.1.06.0002														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	36.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		36.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	10.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	3.500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	3.500.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	-			90 %	570.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	570.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	570.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		570.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			80 %	1.631.105.480,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1.631.105.480,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.420.745.680,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		1.420.745.680,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	-			85 %	157.517.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik	-	157.517.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	11.499.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		11.499.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	126.018.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		126.018.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		20.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	-			80 %	9.520.000.000,00					-	9.520.000.000,00	

		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				4 Laporan	612.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		612.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah													
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				6 Laporan	4.042.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		4.042.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-			80 %	3.854.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3.854.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1.524.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		1.524.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						18.092.076.500,00						10.399.591.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						18.092.076.500,00						10.399.591.000,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						18.092.076.500,00						10.399.591.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Biro PBJ yang ditindaklanjuti	-			90 %	10.428.174.600,00					-	2.935.689.100,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	-			85 %	3.034.283.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	221.778.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													

		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	3.033.278.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		133.278.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.005.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		88.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	-			50 %	322.220.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	185.400.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	65.400.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		65.400.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	-			80 %	785.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	887.581.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	90.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		141.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	45.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		56.379.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	650.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		690.202.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	-			85 %	803.845.465,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	41.281.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	803.845.465,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		41.281.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	-			80 %	2.422.128.135,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1.466.411.900,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

4.01.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.222.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		5.220.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	82.470.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		82.470.700,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.334.435.035,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		1.378.721.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	-			80 %	3.060.698.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		133.236.800,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	13.499.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		14.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	13.499.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		14.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	3.033.700.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		104.236.800,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	-			30 % PKP - PBJ Pro Aktif Lavel	7.663.901.900,00					-	7.463.901.900,00	

		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	879.570.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		879.570.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa													
		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	978.540.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		978.540.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan	-			1 Variabel	2.733.982.900,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	2.633.982.900,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

		Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	694.415.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		694.415.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	-			4 Variabel	2.553.957.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik	-	2.553.957.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.07.1.03.000 1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa													
		Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				250 Orang	894.522.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukun g transforma s i pelayanan publik		894.522.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

4.01.07.1.03.000 2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa													
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	971.875.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		971.875.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.07.1.03.000 3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa													
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	687.560.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		687.560.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
J U M L A H							339.177.709.100,00					332.027.560.817,00		

Sumber: kompilasi data Biro-Biro di Lingkup Setda Prov. Kalti

BAB V

Penutup

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan atau dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode satu tahun yang sifatnya operasional, yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024. Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, diharapkan komitmen sebagai kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan ketentuan dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya.

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan pada tahun 2024, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung pencapaian sasaran tersebut. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

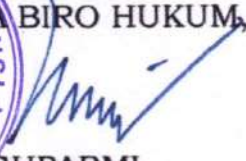
Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009